



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2025-2029**
(Rancangan Akhir)



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2025-2029**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Renstra ini disusun sebagai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara 2025-2029. Lebih dari sekadar dokumen administratif, Renstra ini adalah komitmen kami untuk melakukan transformasi fundamental terhadap sektor industri dan perdagangan di bumi Maluku Utara.

Dengan 901 pulau yang tersebar serta potensi sumber daya alam yang melimpah, Provinsi Maluku Utara memiliki peluang emas untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Namun, perlu disadari bahwa provinsi ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketimpangan pembangunan antarwilayah, tingginya biaya logistik, kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, serta belum optimalnya proses hilirisasi komoditas unggulan.

Sehubungan dengan berbagai tantangan tersebut, ditambah lagi dengan keterbatasan sumber daya dan pendanaan pemerintah daerah, menuntut adanya solusi kreatif. Hal ini memerlukan kerja keras, kerja cerdas, serta langkah-langkah terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan dan pihak terkait guna mendorong percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Maluku Utara.

Renstra 2025-2029 ini disusun guna memastikan bahwa pembangunan industri dan perdagangan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Maluku Utara, dari Morotai hingga Taliabu, dari pulau terbesar hingga pulau terkecil.

Empat isu strategis yang dirumuskan, mulai dari optimalisasi hilirisasi, peningkatan kualitas SDM, efisiensi sistem distribusi, digitalisasi disektor Industri dan Perdagangan, hingga penguatan perlindungan konsumen, akan menjadi fokus kerja kami selama lima tahun ke depan. Selanjutnya, guna menjamin akuntabilitas, maka pada setiap program dan kegiatan dirancang dengan menggunakan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Keterpaduan dan sinergitas dalam melaksanakan program-program pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan merupakan komitmen seluruh stockholder demi mewujudkan peningkatan kinerja yang efektif dan efisien menuju pencapaian target dan sasaran yang telah digariskan di dalam RENSTRA ini.

Sofifi, 13 Oktober 2025

Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Maluku Utara



Yudhitya Wahab, SH, M.Si

NIP. 19810106200501 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB VI PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.3.1 Maksud	4
1.3.2 Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	7
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	38
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	38
2.2.2 Isu Strategis.....	54
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	70
3.1 Tujuan	70
3.2 Sasaran	71
3.3 Strategi	73
3.4 Arah Kebijakan	75
3.5 Kerangka Pendanaan.....	77
3.6 Kerangka Regulasi	77
3.7 Kerangka Kelembagaan	77
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	81
BAB V PENUTUP	118

DAFTAR TABEL

Tabel II.03	Sasaran, Indikator Kinerja, Realisasi Kinerja (Sasaran 1)	26
Tabel II.05	Sasaran dan Indikator Kinerja (Sasaran 2) “Meningkatkan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Daerah”	27
Tabel II.06	Target dan Capaian Realisasi Kinerja 2020 – 2024 (Sasaran 2) “Meningkatnya Kapasitas dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan”	27
Tabel II.07	Rincian Pertumbuhan sektor perdagangan pada tahun 2024 per Sub Sektor	27
Tabel II.08	Rencana, Realisasi dan Persentasi Realisasi Penganggaran 2020 – 2024 (Sasaran 2)	29
Tabel II.09	Sasaran dan Indikator Kinerja (Sasaran 3) “Meningkatkan Ekspor Non Tambang Maluku Utara”	29
Tabel II.10	Target dan Capaian Realisasi Kinerja 2020 – 2024 (Sasaran. 3)	29
Tabel II.11	Ekspor Non Pertambangan Maluku Utara 2023 - 2024	30
Tabel II.12	Sasaran, Indikator Kinerja, Realisasi Kinerja (Sasaran 3) “Meningkatnya Ekspor Komoditi Non Tambang Maluku Utara”	30
Tabel II.13	Rencana, Realisasi dan Persentasi Realisasi Penganggaran 2020 – 2024 (Sasaran 3) “Meningkatnya Ekspor Komoditi Non Tambang Maluku Utara”	31
Tabel II.14	Sasaran dan Indikator Kinerja (Sasaran 4)	31
Tabel II.15	Target dan Capaian Realisasi Kinerja 2020 –2024 (Sasaran 4)	31
Tabel II.16	Rincian Perkembangan (per Sub Sektor) PDRB Industri Manufaktur	32
Tabel II.17	Rincian Kontribusi Per Sub Sektor Industri Pengolahan (Non Logam Dasar) Provinsi Maluku Utara	33
Tabel II.18	Sasaran, Indikator Kinerja, Realisasi Kinerja (Sasaran 4) “Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing industri Pengolahan Maluku Utara”	33
Tabel II.19	Rencana, Realisasi dan Persentasi Realisasi Penganggaran 2020 – 2024 (Sasaran 4)	34
Tabel II.20	Kelompok Sasaran Pelayanan Sektor Perindustrian	35
Tabel II.21	Matriks Kelompok Sasaran Pelayanan Sektor Perdagangan.....	36
Tabel II.24	Ringkasan Analisis Strategis	58
Tabel II.25	Pemetaan Isu Strategis Provinsi Maluku Utara (KLHS)	62
Tabel II.26	Isu strategis Bidang Perindustrian 2025–2029	64
Tabel II.27	Arah Kebijakan Strategis Bidang Perdagangan	66
Tabel II.28	Isu Strategis Bidang Perindustrian Dan Perdagangan	68
Tabel III.01	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	72

Tabel III.02 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029	75
Tabel III.04 Operasionalisasi NSPK Dan Arah Kebijakan	79
Tabel IV.02 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Tahun 2025-2029	101
Tabel IV.03 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	114
Tabel IV.04 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	116
Tabel IV.05 Indikator Kinerja Kunci	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.01	Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17
Gambar II.02	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	18
Gambar II.03	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
Gambar II.04	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal	19
Gambar II.05	Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	20
Gambar II.06	Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa Kerja	20
Gambar II.07	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	21
Gambar II.08	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	21
Gambar II.09	Peta Kelompok Sasaran Lintas Sektor	36

BAB VI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara. Sebagai provinsi kepulauan dengan 901 pulau yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, Maluku Utara memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan lokal serta memperkuat jaringan perdagangan regional dan nasional.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sektor industri dan perdagangan selama lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam konteks pembangunan daerah, sektor industri dan perdagangan Maluku Utara menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang. Posisi geografis yang strategis di jalur perdagangan internasional, kekayaan sumber daya alam terutama hasil laut, pertanian, perkebunan (pala dan cengkeh unggulan dunia), serta cadangan nikel terbesar dunia ($\pm 40\%$ cadangan global) menjadi modal dasar pembangunan. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti:

1. **Konsentrasi ekonomi yang tidak merata** - 70% kontribusi PDRB industri hanya berasal dari 3 kabupaten (Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan Halmahera Utara). Ketimpangan ekonomi di Maluku Utara mencerminkan paradoks pembangunan yang mendalam. Dari 10 kabupaten/kota yang ada, hanya 3 kabupaten (Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan Halmahera Utara) yang menyumbang 70% dari total PDRB sektor industri provinsi. Ketiga kabupaten ini menjadi pusat gravitasi ekonomi karena keberadaan industri pengolahan mineral, khususnya nikel, yang telah menarik investasi besar-besaran. Sementara itu, 7 kabupaten/kota lainnya tertinggal jauh, hanya berbagi 30% sisanya. Kepulauan Sula, Taliabu, Morotai, dan pulau-pulau kecil lainnya seolah menjadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Padahal, wilayah-wilayah ini memiliki potensi sumber daya yang tidak kalah melimpah dari hasil laut, perkebunan pala dan cengkeh, hingga

potensi wisata bahari. Ketimpangan ini menciptakan migrasi tenaga kerja produktif ke pusat-pusat industri, memperparah kesenjangan pembangunan antar wilayah.

2. **Keterbatasan infrastruktur dan konektivitas** - Biaya logistik mencapai 40-50% dari harga jual produk. Geografis kepulauan dengan 901 pulau menjadi berkah sekaligus kutukan bagi Maluku Utara. Biaya logistik yang mencapai 40-50% dari harga jual produk membuat daya saing produk lokal terpuruk. Setengah dari harga yang dibayar konsumen hanya untuk memindahkan barang dari satu pulau ke pulau lain.

Keterbatasan sarana prasarana perhubungan serta kendala jadwal tidak teratur membuat proses distribusi barang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Pelabuhan-pelabuhan kecil dengan fasilitas seadanya tidak mampu menampung kapal besar. Dermaga yang sempit, alat bongkar muat manual, dan ketiadaan cold storage membuat produk perikanan dan pertanian mudah rusak. Akses jalan dari pelabuhan ke pusat produksi yang masih berupa jalan tanah menimbulkan hambatan tersendiri khususnya pada musim penghujan. Kondisi ini membuat harga kebutuhan pokok khususnya di pulau-pulau terluar berpotensi besar mengalami disparitas yang cukup lebar dibandingkan harga kebutuhan pokok di pusat kota.

3. **Rendahnya kualitas SDM** - 44,8% pekerja industri berpendidikan rendah dengan rata-rata upah Rp 2,3 juta (di bawah rata-rata nasional Rp 3,02 juta). Data yang mencengangkan: hampir separuh (44,8%) pekerja di sektor industri Maluku Utara hanya berpendidikan SD atau bahkan tidak bersekolah. Mereka adalah generasi yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan, bekerja sebagai buruh kasar dengan upah rata-rata hanya Rp 2,3 juta per bulan jauh di bawah rata-rata nasional Rp 3,02 juta.

Rendahnya pendidikan ini berdampak langsung pada produktivitas. Pekerja kesulitan mengoperasikan mesin modern, lambat beradaptasi dengan teknologi baru, dan minim inisiatif untuk meningkatkan keterampilan. Industri terpaksa mendatangkan tenaga ahli dari luar daerah atau bahkan tenaga kerja asing untuk posisi-posisi teknis. Ironisnya, melimpahnya sumber daya alam tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang mampu mengolahnya. Generasi muda yang berhasil mengenyam pendidikan tinggi cenderung mencari peluang di luar daerah, menciptakan *brain drain* sehingga memperparah kondisi yang ada (*Brain drain* : “Perpindahan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi seperti ilmuwan, insinyur, dokter, atau profesional lainnya ke luar daerah atau wilayah untuk mencari peluang kerja, pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik”).

4. **Belum optimalnya hilirisasi** - Dominasi ekspor bahan mentah tanpa pengolahan lanjutan. Maluku Utara bagaikan raksasa yang tidur di atas harta karun. Memiliki 40% cadangan nikel

dunia, namun sebagian besar diekspor dalam bentuk bijih mentah maupun setengah jadi dengan nilai ekonomi yang belum optimal. Pala dan cengkeh yang menjadi komoditas unggulan dunia dijual dalam bentuk biji kering tanpa pengolahan lebih lanjut. Ikan-ikan segar langsung dikirim ke luar negeri tanpa sentuhan nilai tambah.

Ketergantungan pada ekspor bahan mentah ini membuat ekonomi daerah sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Ketika harga nikel jatuh, ekonomi daerah ikut terpuruk. Padahal, jika diolah menjadi produk hilir stainless steel, baterai kendaraan listrik, minyak atsiri pala, atau produk perikanan siap saji, nilai ekonominya bisa berlipat ganda. Sayangnya, keterbatasan teknologi, modal, dan SDM membuat mimpi hilirisasi masih jauh dari kenyataan.

Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis baik pada tingkat global, nasional, maupun regional. Revolusi Industri, digitalisasi perdagangan global, komitmen *Net Zero Emission* 2050, serta integrasi ekonomi regional ASEAN dan Indo-Pasifik menjadi pertimbangan penting. Di tingkat nasional, program Making Indonesia 4.0, kebijakan hilirisasi mineral, serta target kontribusi manufaktur terhadap PDB menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen ini.

Dengan visi pembangunan Provinsi Maluku Utara 2025-2029 yaitu ***"Menjaga Keberagaman dan Pemerataan Pembangunan Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan"***, Renstra ini dirancang untuk mendukung transformasi ekonomi daerah melalui pengembangan industri dan perdagangan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor **[sesuai Perda]** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara 2025-2029;
16. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai:

1. Dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 2025-2029;
2. Instrumen untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan sektor industri dan perdagangan dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah;
3. Dasar penyusunan rencana kerja tahunan dan penganggaran berbasis kinerja;

4. Alat pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan pembangunan sektor industri dan perdagangan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan sektor industri dan perdagangan yang sejalan dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029;
2. Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan pembangunan sektor industri dan perdagangan serta merumuskan strategi pemecahannya;
3. Menyusun program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2029 beserta indikator kinerja yang terukur;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk pencapaian target pembangunan sektor industri dan perdagangan;
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pembangunan sektor industri dan perdagangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menyajikan informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sumber daya yang dimiliki, pencapaian kinerja periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang yang dihadapi. Mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan isu strategis yang menjadi fokus pembangunan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan tujuan dan sasaran strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sektor industri dan perdagangan

yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target capaian.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan rencana program dan kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan indikatif untuk periode 2025-2029, serta penentuan target pencapaian tujuan dan sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan komitmen pelaksanaan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas Pokok

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri, pengembangan perdagangan, serta perlindungan konsumen;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri, pengembangan perdagangan, serta perlindungan konsumen;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pengkoordinasian dengan instansi terkait bidang pengembangan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri, pengembangan perdagangan, serta perlindungan konsumen;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri, pengembangan perdagangan, serta perlindungan konsumen;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

a. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- Pengkoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengkoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengkoordinasian pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- Pengkoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan.

Sekretariat Dinas terdiri atas :

- Subbagian umum dan kepegawaian; dan
- Kelompok jabatan fungsional.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan umum dan ketatausahaan meliputi: pengelolaan urusan kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan ruangan Gedung/ kantor, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tata naskah dinas, kepegawaian dan tugas umum lainnya, berdasarkan pedoman/ peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sekretariat;
- Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Bidang Sarana, Kawasan dan Data Industri

Bidang Sarana, Kawasan dan Data Industri, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana dan Prasarana Industri, dan Pemberdayaan Industri berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sarana, Kawasan dan Data Industri menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;
- Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
- Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota;
- Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;

- Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi;
- Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan system informasi industri di provinsi; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pengembangan Industri

Bidang Pengembangan Industri, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri berdasarkan pedoman dan peraturan perundang -- undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan provinsi;
- Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam Provinsi;
- Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
- Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
- Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;

d. Bidang Pengembangan Perdagangan

Bidang Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan

teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri berdasarkan pedoman dan peraturan perundang - undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan pedoman pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi, Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko bebas Bea, penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha perdagangan Minuman Beralkohol bagi distributor, dan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya;
- Pelaksanaan identifikasi dan usulan pembanguna pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
- Pelaksanaan dan monitoring pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distrubusi provinsi serta pelaku usaha distribusi;
- Pelaksanaan pengembangan kompetensi pengelola pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pelaku usaha distribusi;
- Pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola pusat distribusi;
- Pelaksanaan sosialisasi kebijakan terkait penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi;
- Pembentukan tim pengawas dan pemeriksa pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sarana distribusi bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi;
- Pemantauan distribusi, harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi;
- Koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi;
- Penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi;

- Koordinasi dengan *stakeholders* untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- Penyusunan rencana produksi dan konsumsi barang yang diantar pulaukan di tingkat daerah provinsi;
- Fasilitasi kelancaran distribusi barang melalui perdagangan antar pulau;
- Pembinaan pelaku usaha distribusi;
- Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pelaku usaha distribusi;
- Pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Surat izin Usaha perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya;
- Rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha perdagangan Minuman Beralkohol Bagi Distributor;
- Pemberian layanan sistem informasi pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi, Penerbitan Surat Izin Usaha perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea, penerbitan Surat izin Usaha perdagangan ahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya, pemeriksaan saran distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat provinsi;
- Pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sarana distribusi bahan berbahaya, perdagangan antar pulau dan perbatasan, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi;
- Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi;
- Pelaksanaan pemantauan harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi;
- Penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- Pelaksanaan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- Penyiapan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3 provinsi), produsen, distributor, dan pengecer pupuk bersubsidi di tingkat daerah provinsi;
- Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan produk lokal/unggulan daerah, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sector perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sector perdagangan);
- Penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) provinsi;
- Penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- Pelaksanaan pengembangan kompetensi pelaku usaha dan promosi produk ekspor sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing provinsi;
- Penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas daerah provinsi);
- Pemetaan produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
- Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal dan Angka Pengenal Importir; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Perlindungan Konsumen

Bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 5, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan

teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, tertib niaga, serta kelembagaan dan pemberdayaan konsumen berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil- Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja provinsi;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja provinsi;
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja provinsi;
- Penyiapan operasional pengawasan berkala/khusus di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja provinsi;
- Penyiapan bahan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, bimbingan operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen, penegakan hukum pengawasan barang beredar dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja provinsi;

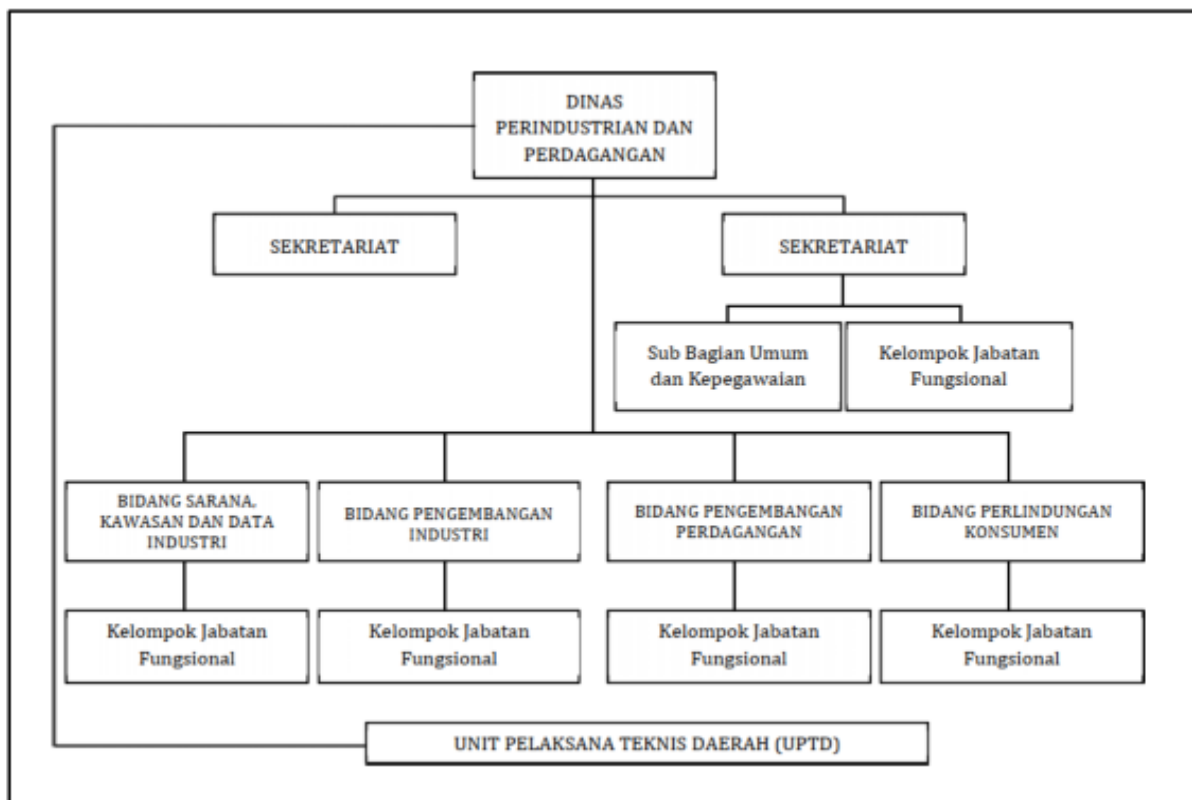
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup), analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pengawasan barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya di wilayah kerja provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan;
- Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan, dan penegakan hukum

perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja provinsi;

- Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, analisa kasus perdagangan, bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS- DAG) dan penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan analisa kasus hasil pengawasan bimbingan operasional Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), penegakan hukum pengawasan barang dan jasa, dan analisa kasus hasil pengawasan di wilayah kerja provinsi;
- Pelaksanaan pengusulan pembentukan BPSK;
- Pelaksanaan seleksi Anggota dan Sekretariat BPSK;
- Pelaksanaan penganggaran operasional BPSK;
- Pelaksanaan rekapitulasi data kasus dan tindak lanjut pengaduan konsumen di BPSK di wilayah kerjanya;
- Pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan TDLPK bagi LPKSM;
- Pembinaan sumber daya manusia BPSK dan LPKSM;
- Pelaksanaan edukasi konsumen;
- Pelaksanaan pembinaan pelaku usaha tentang perlindungan konsumen dan motivator perlindungan konsumen;
- Pelaksanaan penyediaan informasi dan publikasi perlindungan konsumen;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan konsumen;
- Pelaksanaan pelayanan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen skala provinsi;
- Pelaksanaan rekapitulasi data pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen skala provinsi;
- Pelaksanaan pelayanan konsultasi di bidang perlindungan konsumen;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar II.01 Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disperindag (Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara), 2021

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

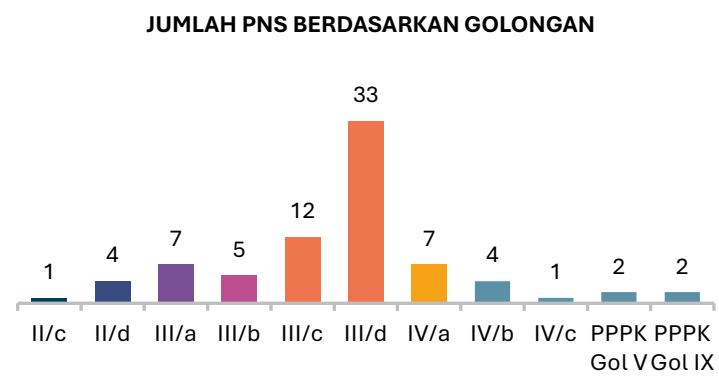
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara memiliki sumber daya utama yaitu aparatur dan juga sarana dan prasarana yang dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.2.1 Aparatur

Adapun sumber daya aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara per 31 Desember 2024 sebanyak 79 orang. Dari jumlah dimaksud, terdapat 19 orang yang bertugas di Ternate yaitu pada UPTD BPSMB. Komposisi tenaga personil tersebut diatas, ditinjau dari berbagai aspek dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Golongan

Gambar II.02 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

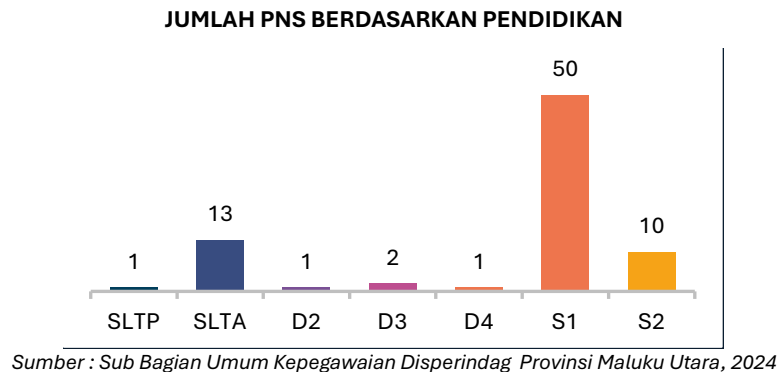


Sumber : Sub Bagian Umum Kepegawaian, Disperindag Provinsi Maluku Utara, 2024

Dari data di atas menunjukkan bahwa berdasarkan golongan sebagian besar Pegawai di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara memiliki status golongan III/d yaitu berjumlah 33 orang (42,31 %), sedangkan yang memiliki jumlah terendah yakni golongan II/c dan IV/c yaitu masing-masing berjumlah 1 orang (1,28%).

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

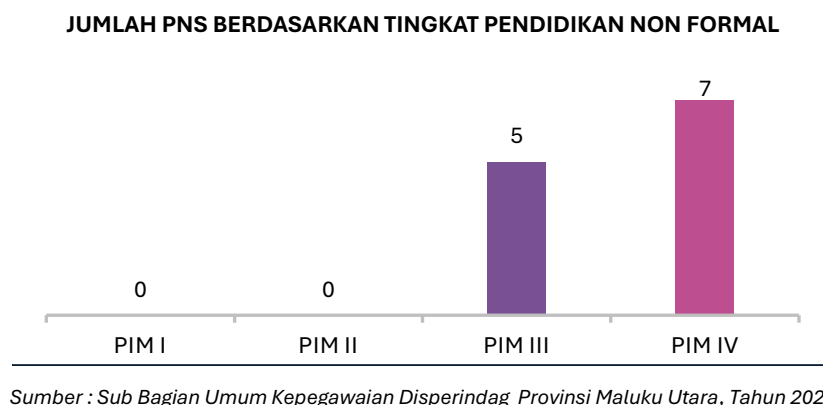
Gambar II.03 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan data Tingkat Pendidikan Pegawai di lingkup Dinas Perindag Provinsi Maluku Utara didominasi oleh tingkat Pendidikan Sarjana strata satu (S1) yaitu berjumlah 50 Orang atau sebesar 64,10 %, tingkat pendidikan SLTA yakni sebesar 17,72 % (14 orang), dan lulusan Sarjana strata dua (S2) sebesar 12,66 % (10 Orang), Dengan komposisi tersebut menunjukkan bahwa potensi pemahaman dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang tugas masing-masing akan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan bingkai aturan yang berlaku.

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal

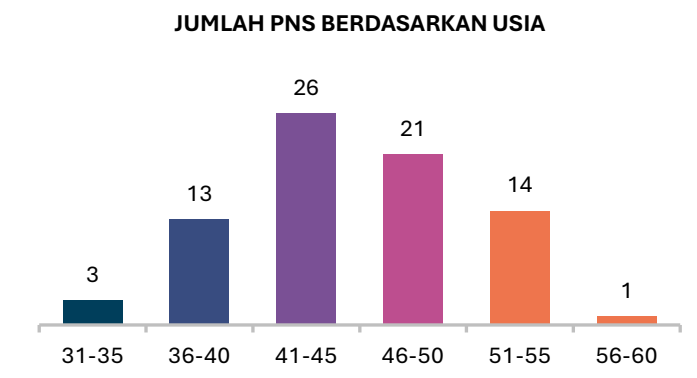
Gambar II.04 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal



Berdasarkan data Tingkat Pendidikan Non Formal di lingkup Dinas Perindag Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa yang sudah mengikuti PIM IV adalah sebesar 8.86 % (7 orang) serta untuk PIM III adalah sebesar 6.33 % (5 orang), sedangkan yang lainnya belum pernah mengikuti Pendidikan non formal.

d. Berdasarkan Usia

Gambar II.05 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

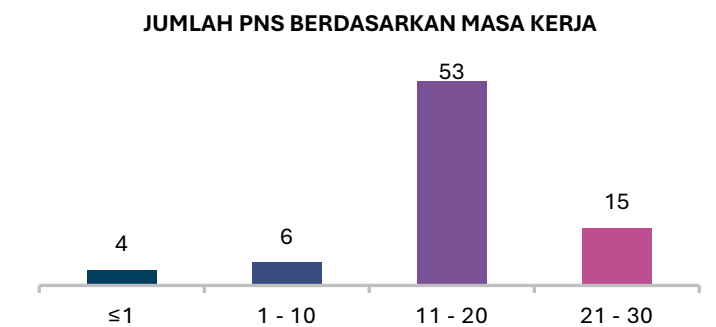


Sumber : Sub Bagian Umum Kepegawaian Disperindag Provinsi Maluku Utara, 2024

Berdasarkan data Tingkat Usia, pegawai di lingkup Dinas Perindag Provinsi Maluku Utara didominasi oleh pegawai dengan rentang usia 41-45 Tahun dengan jumlah 26 orang (33,33 %), diikuti dengan pegawai dengan rentang usia 46 – 50 Tahun dengan jumlah 21 orang (26,92%), serta usia 51 - 55 tahun dengan jumlah 14 orang (17,95%)

e. Berdasarkan Masa Kerja

Gambar II.06 Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa Kerja



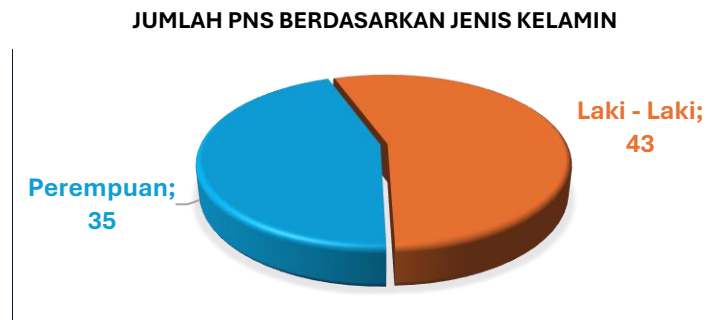
Sumber : Sub Bagian Umum Kepegawaian Disperindag Provinsi Maluku Utara, 2024

Berdasarkan data masa kerja di lingkup Dinas Perindag Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa masa kerja masa kerja kurang dari 1 tahun adalah sebesar 5,13%, 1 sampai 10 tahun sebesar 7,69 %, 11 sampai 20 tahun sebesar 67,95 %, serta masa kerja 21 sampai 30 tahun sebesar 19,23%. Hal ini terlihat bahwa jumlah pegawai yang memiliki masa kerja di atas 11 tahun yakni sebesar 87,18 % adalah pegawai yang dikategorikan sudah berpengalaman dalam menjalankan tugas pokok

dan fungsinya di bidang masing-masing, sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya pada tahun-tahun mendatang.

f. Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar II.07 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

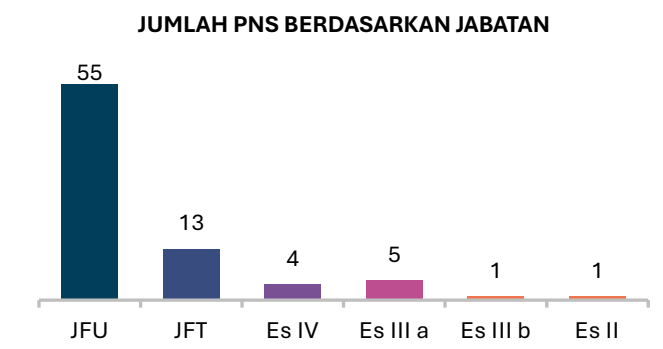


Sumber : Sub Bagian Umum Kepegawaian Disperindag Provinsi Maluku Utara, Tahun 2024

Berdasarkan data jenis kelamin pegawai di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa angka laki-laki lebih besar dari wanita yakni laki-laki sebesar 44,56 %, dan jenis kelamin wanita sebesar 35,44 % (persen).

g. Berdasarkan Tingkat Jabatan

Gambar II.08 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan



Sumber : Sub Bagian Umum Kepegawaian Disperindag Provinsi Maluku Utara, Tahun 2024

Data per 31 Desember 2024, dari total jabatan struktur yang berjumlah 11 posisi dan seluruhnya lengkap terisi.

2.1.2.2 Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana saat ini yang tersedia di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara yang digunakan untuk mendukung dan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel II.01 Sarana dan Prasarana Kerja Disperindag Provinsi Maluku Utara

KODE BARANG	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	32.288.929.505,10
1.3.1	TANAH	497.886.000,00
1.3.1.01.02.09.01	tanah non persil lainnya lainnya (dst)	497.886.000,00
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	3.390.810.242,00
1.3.2.02.01.01.03	Station Wagon	273.000.000,00
1.3.2.02.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	186.618.000,00
1.3.2.02.01.04.01	Sepeda Motor	109.700.001,00
1.3.2.03.01.03.33	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	4.534.000,00
1.3.2.03.01.04.13	perkakas bengkel service lainnya (dst)	68.959.000,00
1.3.2.03.01.07.03	Perkakas Bongkar/Pasang Ban	31.103.600,00
1.3.2.03.02.03.04	perkakas bengkel service lainnya (dst)	56.362.900,00
1.3.2.03.02.06.07	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	2.147.200,00
1.3.2.03.02.08.13	Kunci Pas	33.095.700,00
1.3.2.04.01.04.05	Lemari Penyimpan	22.583.305,00
1.3.2.05.01.01.05	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inci)	9.994.380,00
1.3.2.05.01.04.01	Lemari Besi/Metal	1.500.000,00
1.3.2.05.01.04.02	Lemari Kayu	45.618.000,00
1.3.2.05.01.04.05	Filing Cabinet Besi	38.451.520,00
1.3.2.05.01.04.06	Filing Cabinet Kayu	40.000.000,00
1.3.2.05.01.04.23	Box Truck	880.000,00
1.3.2.05.01.04.27	Lemari Kaca	40.440.500,00
1.3.2.05.01.05.43	LCD Projector/Infocus	9.085.000,00
1.3.2.05.01.05.76	Papan Nama Instansi	3.495.250,00
1.3.2.05.02.01.02	Meja Kerja Kayu	9.146.050,00
1.3.2.05.02.01.03	Kursi Besi/Metal	1.982.200,00
1.3.2.05.02.01.10	Tempat Tidur Kayu	116.100.000,00

KODE BARANG	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3.2.05.02.01.24	Meja 1/2 Biro	124.874.088,00
1.3.2.05.02.01.28	Meja Makan Kayu	22.500.000,00
1.3.2.05.02.01.30	Kursi Rapat	49.372.400,00
1.3.2.05.02.01.32	Kursi Putar	101.049.480,00
1.3.2.05.02.01.33	Kursi Biasa	500.000,00
1.3.2.05.02.01.36	Kursi Lipat	1.000.000,00
1.3.2.05.02.01.39	Meja Komputer	4.500.000,00
1.3.2.05.02.01.48	Sofa	45.279.000,00
1.3.2.05.02.01.50	Meubeleur lainnya	26.250.000,00
1.3.2.05.02.03.07	Alat Pembersih lainnya	579.280,00
1.3.2.05.02.04.01	Lemari Es	9.890.650,00
1.3.2.05.02.04.02	A.C. Sentral	10.944.800,00
1.3.2.05.02.04.03	A.C. Window	52.380.000,00
1.3.2.05.02.04.04	A.C. Split	131.139.800,00
1.3.2.05.02.05.11	Treng Air/Tandon Air	2.768.420,00
1.3.2.05.02.06.02	Televisi	15.807.000,00
1.3.2.05.02.06.12	Wireless	6.957.500,00
1.3.2.05.03.01.04	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1.250.000,00
1.3.2.05.03.02.04	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1.250.000,00
1.3.2.05.03.02.09	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1.625.000,00
1.3.2.05.03.03.04	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1.250.000,00
1.3.2.05.03.04.04	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	5.000.000,00
1.3.2.05.03.05.04	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2.500.000,00
1.3.2.05.03.06.04	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	19.343.250,00
1.3.2.05.03.07.09	Buffet Kaca	11.116.000,00
1.3.2.05.03.07.10	Lemari Arsip Pejabat lainnya	25.634.900,00
1.3.2.06.01.01.36	Microphone/Wireless MIC	11.870.000,00
1.3.2.06.01.02.105	Layar Film/Projector	15.343.000,00
1.3.2.06.01.02.126	Camera Digital	14.000.000,00
1.3.2.07.01.05.92	Instrument Trolley, Stainless Steel	2.400.000,00
1.3.2.08.01.13.12	Alat laboratorium kimia lainnya (dst)	647.985.823,00
1.3.2.08.01.64.01	Unit alat laboratorium lainnya lainnya (dst)	76.310.000,00

KODE BARANG	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3.2.08.03.12.02	Bendera Merah Putih	250.000,00
1.3.2.09.04.07.22	Layar Proyektor	1.380.000,00
1.3.2.10.01.02.01	P.C Unit	100.581.000,00
1.3.2.10.01.02.02	Lap Top	471.553.715,00
1.3.2.10.01.02.09	Tablet PC	13.800.000,00
1.3.2.10.02.02.16	Speaker Komputer	2.310.000,00
1.3.2.10.02.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	104.070.780,00
1.3.2.10.02.03.07	External	1.456.950,00
1.3.2.15.03.02.05	Tenda	147.940.800,00
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	28.310.386.460,10
1.3.3.01.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.010.428.080,00
1.3.3.01.01.05.01	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	300.420.000,00
1.3.3.01.01.12.01	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	25.396.090.180,10
1.3.3.01.01.12.04	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	401.800.000,00
1.3.3.01.01.30.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1.157.280.000,00
1.3.3.01.01.30.05	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	44.368.200,00
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	89.846.803,00
1.3.5.07.01.01.07	Aset Renovasi	89.846.803,00
1.5	ASET LAINNYA	2.959.759.500,00
1.5.4	ASET LAIN-LAIN	2.959.759.500,00
1.5.4.01.01.01.02	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	139.107.500,00
1.5.4.01.01.01.03	Gedung dan Bangunan Rusak Berat	2.820.652.000,00

Sumber : Bidang Sekretariat Disperindag Provinsi Maluku Utara, 2024

Sebagaimana yang tercantum pada neraca keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara per 31 Desember 2024, nilai aset mencapai Rp. 32.288.929.505,10,- termasuk diantaranya adalah 5 unit pasar yang dibangun pada tahun 2015 serta gedung kantor UPTD BPSMB di Ternate yang merupakan hibah dari Kementerian Perdagangan. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara berada pada Kompleks Kantor Gubernur Maluku Utara. Jl. Gosale Puncak No. 1 Sofifi.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara merupakan gambaran dari realisasi kinerja yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 termasuk di dalamnya dokumen perencanaan lainnya yang menjabarkan tujuan, sasaran, dan penetapan indikator kinerja serta keterkaitannya dengan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara tahunan 2020 hingga 2024.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis dan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara Gambaran capaian kinerja perlu diurai sebagai berikut :

Sasaran 1 : *Meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, pengamanan perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen*

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, pengamanan perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024. Adapun sasaran, indikator kinerja termasuk realisasi kinerja Tahun 2020-2024, tergambar pada table berikut :

Tabel II.02 Sasaran dan Indikator Kinerja (Sasaran 1)

“Meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, pengamanan perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen”

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas distribusi, pengamanan perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen	Tingkat Inflasi (± 1)

Sumber : Renstra Disperindag Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020

Indikator kinerja dari sasaran “Meningkatnya efisiensi dan efektivitas distribusi, pengamanan perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen” sebagaimana tabel diatas jika dilakukan pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 - 2024, maka capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel II.03 Sasaran, Indikator Kinerja, Realisasi Kinerja (Sasaran 1)
 “Meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, pengamanan perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen”

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020				TAHUN 2021				TAHUN 2022				TAHUN 2023				TAHUN 2024			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT
Sasaran 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, pengamanan perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen	Tingkat Inflasi (*1)	%	2,25 ± 1	2,13	100	Baik	2,35	2,38	100	Baik	2,25 ± 1	3,37	96,31	Baik	2,25 ± 1	4,41	64,31	Cukup	2,25 ± 1	1,5	100	Baik

Sumber : Renstra dan LAKIP Tahun 2020-2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara , Tahun 2020-2024

- Sebagaimana tergambar pada tabel diatas bahwa, selain tahun 2023, capaian indikator “Tingkat Inflasi” tahunan telah sesuai dengan yang ditargetkan dan berada pada tahap terkendali dengan baik yaitu berada pada rentang 2,25±1. Pada tahun 2022, capaian Tingkat inflasi berada sedikit diatas target yang diharapkan yaitu sebesar 3,37 (atau melebihi 0,12 dari nilai yang ditargetkan), meski demikian capaian kinerja dimaksud masih masuk pada kategori berpredikat “baik”. Berbeda halnya dengan Tahun 2023, capaian Target inflasi
- Pada Tahun 2024, Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada 6 (enam) kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,21 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,65 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,95 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,77 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,44 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,47 persen. Sementara 5 (lima) kelompok mengalami deflasi, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,40 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,20 persen; kelompok transportasi sebesar 3,99 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,30 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,12 persen.

Selain penjelasan tentang capaian kinerja perlu juga dilakukan analisa terhadap penggunaan sumber daya. Analisa ini bertujuan untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran. Analisis penggunaan sumber daya sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.04 Rencana, Realisasi dan Persentasi Realisasi Penganggaran 2020 – 2024 (Sasaran 1)
“Meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, pengamanan perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen”

SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2020				TAHUN 2021				TAHUN 2022				TAHUN 2023				TAHUN 2024			
	RENSTRA (Rp. Juta)	DPA (Rp. Juta)	REALISASI (Rp. Juta)	%	RENSTRA (Rp. Juta)	DPA (Rp. Juta)	REALISASI (Rp. Juta)	%	RENSTRA (Rp. Juta)	DPA (Rp. Juta)	REALISASI (Rp. Juta)	%	RENSTRA (Rp. Juta)	DPA (Rp. Juta)	REALISASI (Rp. Juta)	%	RENSTRA (Rp. Juta)	DPA (Rp. Juta)	REALISASI (Rp. Juta)	%
Meningkatnya Kapasitas dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan	1.700	3.017	1.206	39,95	28.320	6.372	5.821	91,36	28.570	17.394	5.940	34,15	28.750	9.205	5.585	60,67	28.750	2.757	2.747	99,64

Sumber : Renstra Disperindag 2020-2024, DPPA, LAKIP 2020-2024, Bidang Sekretariat Disperindag Prov. Maluku, 2020-2024 (Diolah)

Sasaran 2 : Meningkatkan Kapasitas dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Adapun sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel II.05 Sasaran dan Indikator Kinerja (Sasaran 2)
“Meningkatkan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Daerah”

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Meningkatnya Kapasitas dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Pertumbuhan PDRB Perdagangan (%)

Sumber : Renstra Disperindag Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020

Indikator kinerja dari sasaran “Meningkatnya Kapasitas dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan” sebagaimana tabel diatas jika dilakukan pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 - 2024, maka capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel II.06 Target dan Capaian Realisasi Kinerja 2020 – 2024 (Sasaran 2)
“Meningkatnya Kapasitas dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan”

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020				TAHUN 2021				TAHUN 2022				TAHUN 2023				TAHUN 2024			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT
Sasaran 2. Meningkatkan Kapasitas dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Pertumbuhan PDRB Perdagangan (%)	%	5,5 - 7,75	-5,78	0	Kurang	2,14	2,11	98,60	Baik	4,01	7,31	100	Baik	5,88	5,78	98,3	Baik	5,5 - 7,75	14,24	100	Baik

Sumber : Renstra dan Laporan Kinerja Tahun 2020-2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara , 2020-2024

Tabel II.07 Rincian Pertumbuhan sektor perdagangan pada tahun 2024 per Sub Sektor

Lapangan Usaha (Subkategori)	PDRB (Atas Dasar Harga Konstan 2010) (Milyar Rupiah)					Laju Pertumbuhan (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020 (Masa Pandemi)	2021	2022	2023	2024
Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4595	4692	5034,8	5325,6	6084	-5,78	2,11	7,31	5,78	14,24
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	133,7	142,1	160,6	164,3	179,1	-25,14	6,28	13,02	2,30	9,01
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	4461,3	4549,9	4874,2	5161,3	5904,9	-5,05	1,99	7,13	5,89	14,41

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, Maluku Utara dalam Angka, 2020-2024

Kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara pada sektor Perdagangan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. **Pertumbuhan Ekonomi Regional:** Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Maluku Utara mendorong peningkatan aktivitas perdagangan dan reparasi. Peningkatan pendapatan Masyarakat turut mendorong daya beli Masyarakat, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa pada sektor ini juga ikut meningkat.
2. **Peningkatan Investasi:** Adanya investasi baru di sektor perdagangan dan reparasi, baik dari dalam maupun luar daerah, dapat meningkatkan kapasitas dan produktivitas sektor tersebut. Investasi ini bisa berupa pembukaan toko baru, pusat perbelanjaan, atau bengkel reparasi.
3. **Meningkatnya Infrastruktur yang Memadai:** Pembangunan infrastruktur yang mendukung, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara memudahkan distribusi barang dan jasa, sehingga mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan reparasi.
4. **Stabilitas Harga:** Stabilitas harga barang dan jasa, termasuk bahan bakar dan suku adang kendaraan, dapat mendorong aktivitas perdagangan dan reparasi. Jika harga stabil, konsumen dan pelaku usaha akan lebih percaya diri dalam melakukan transaksi.
5. **Perkembangan Teknologi:** Adopsi teknologi baru dalam perdagangan (*e-commerce*) dan reparasi kendaraan juga ikut meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor ini, yang pada akhirnya berkontribusi mendorong pertumbuhan PDRB pada sektor ini.
6. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:** Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan di sektor perdagangan dan reparasi.

Faktor-faktor ini saling berkaitan dan dapat bersama-sama berkontribusi pada kenaikan PDRB Maluku Utara di sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2020-2024. Selain penjelasan tentang capaian kinerja diatas maka perlu juga dilakukan analisa terhadap penggunaan sumber daya. Analisa ini bertujuan untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran. Analisis penggunaan sumber daya sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.08 Rencana, Realisasi dan Persentasi Realisasi Penganggaran 2020 – 2024 (Sasaran 2)
“Meningkatnya Kapasitas dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan”

SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2020				TAHUN 2021				TAHUN 2022				TAHUN 2023				TAHUN 2024			
	RENSTRA (Rp. Juta)	DPA (Rp. Juta)	REALISASI (Rp. Juta)	%	RENSTRA (Rp. Juta)	DPA (Rp. Juta)	REALISASI (Rp. Juta)	%	RENSTRA (Rp. Juta)	DPA (Rp. Juta)	REALISASI (Rp. Juta)	%	RENSTRA (Rp. Juta)	DPA (Rp. Juta)	REALISASI (Rp. Juta)	%	RENSTRA (Rp. Juta)	DPA (Rp. Juta)	REALISASI (Rp. Juta)	%
Meningkatnya Kapasitas dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan	1.700	3.017	1.205	39,95	28.320	6.372	5.821	91,36	28.570	17.394	5.940	34,15	28.750	9.205	5.585	60,67	28.750	2.757	2.747	99,64

Sumber : Renstra Disperindag 2020-2024, DPPA, LAKIP 2020-2024, Disperindag Prov. Maluku, Tahun 2020-2024 (Diolah)

Sasaran 3 : Meningkatkan Ekspor Non Tambang Maluku Utara

Adapun sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel II.09 Sasaran dan Indikator Kinerja (Sasaran 3)
“Meningkatkan Ekspor Non Tambang Maluku Utara”

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Meningkatnya Ekspor Komoditi Non Tambang Maluku Utara	Perkembangan Nilai Ekspor Non Pertambangan (%)

Sumber : Renstra Disperindag Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020

Indikator kinerja dari sasaran “Meningkatkan Ekspor Non Tambang Maluku Utara” sebagaimana tabel diatas setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020-2024, maka capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel II.10 Target dan Capaian Realisasi Kinerja 2020 – 2024 (Sasaran. 3)
“Meningkatnya Ekspor Komoditi Non Tambang Maluku Utara”

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020				TAHUN 2021				TAHUN 2022				TAHUN 2023				TAHUN 2024			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT
Sasaran 3. Meningkatkan Ekspor Komoditi Non Tambang Maluku Utara	Perkembangan Nilai Ekspor Non Pertambangan	%	10	5,35	59,48	Cukup	10,77	7,31	67,87	Cukup	7,82	61,01	100	Baik	10	-19,27	0%	Buruk	10	105,51	100	Baik

Sumber : Renstra dan Laporan Kinerja Tahun 2020-2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara

- Capaian untuk indikator kinerja “Perkembangan Nilai Ekspor Non Pertambangan” pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 10% dari tahun sebelumnya (Capaian 2023 = US\$ 9.527.407,53), sedangkan realisasi pada Tahun 2024 capaian meningkat sebesar 105,51% (dengan Nilai FOB sebesar = US\$ 19.580.084,23)
- Lonjakan ekspor non Pertambangan pada tahun 2024 didorong oleh ekspor komoditi Kayu, Barang dari Kayu (Kode HS : 44), Biji-bijian berminyak (Kode HS : 12), Ikan dan Udang (Kode HS : 03), rincian komoditi Ekspor Non pertambangan tergambar pada table sebagai berikut :

Tabel II.11 Ekspor Non Pertambangan Maluku Utara 2023 - 2024

NO	Jenis Komoditi	Volume (ton)			Nilai FOB (US \$)		
		2023	2024	% Perubahan	2023	2024	% Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	03 - Ikan dan Udang	3.499,51	1.627,03	-53,51	8.256.413,75	11.751.852,65	42,34
2	08 - Buah-buahan	239,06	0,05	-99,98	249.295,34	71,30	-99,97
3	09 - Kopi, Teh, Rempah-rempah	32,41	44,14	36,19	312.036,53	438.280,00	40,46
4	12 - Biji-bijian berminyak	75,80	156,56	106,54	48.000,00	134.970,40	181,19
5	13 - Lak, Getah dan Damar	427,13	451,64	5,74	506.134,40	556.921,61	10,03
6	16 - Daging dan Ikan Olahan	14,12	0,04	-99,72	27.049,00	466,68	-98,27
7	18 - Kakao dan olahan kakao	2,07	0,18	-91,30	1.630,80	2.167,00	32,88
8	21 - Berbagai Makanan Olahan		0,31			14.746,00	100,00
9	23 - Ampas/ Sisa Industri Makanan	32,60	21,60	-33,74	46.436,80	16.092,00	-65,35
10	33 - Minyak Atsiri, Kosmetik Wangi-wangian	1,11	-	-100,00	47.845,67	-	-100,00
11	39 - Plastik dan Barang dari Plastik		0,08			73,00	100,00
12	44 - Kayu, Barang dari Kayu	10,53	40.786,90	387.239,98	11.184,86	6.656.202,14	59410,82
13	61 - Barang-barang Rajutan		-		64,17	-	-100,00
14	99 - Paket pos, parsel, dan barang dikembalikan	6,90	0,23	-96,67	21.316,21	8.241,45	-61,34
	TOTAL	4.341,24	43.088,76	892,54	9.527.407,53	19.580.084,23	105,51

Sumber : BPS Maluku Utara, Maluku Utara Dalam Angka, 2025

Adapun capaian kinerja pada tahun 2020-2024 jika dibandingkan dengan capaian untuk beberapa tahun terakhir, maka hasilnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel II.12 Sasaran, Indikator Kinerja, Realisasi Kinerja (Sasaran 3)
“Meningkatnya Ekspor Komoditi Non Tambang Maluku Utara”

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020				TAHUN 2021				TAHUN 2022				TAHUN 2023				TAHUN 2024			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT
Sasaran 3. Meningkatkan Ekspor Komoditi Non Tambang Maluku Utara	Perkembangan Nilai Ekspor Non Tambang	%	10	5,95	59,48	Cukup	10,77	7,31	67,87	Cukup	7,82	61,01	100	Baik	10	-19,27	0%	Buruk	10	105,51	100	Baik

Sumber : Renstra Disperindag 2020-2024, LAKIP 2020-2024, Bidang Sekretariat Disperindag Prov. Malut, 2020-2024 (Diolah)

Nilai ekspor non-tambang Maluku Utara pada tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Target yang diamanatkan dalam Renstra 2020-2024 bahwa pertumbuhan Nilai Ekspor Non Pertambangan adalah sebesar 10% setiap tahunnya.

Terlihat bahwa target nilai kinerja ekspor Provinsi Maluku Utara pada tahun 2024 terhadap target yang diamanatkan oleh Renstra 2020-2024 sudah tercapai bahkan melampaui target dengan realisasi sebesar US\$ 19.580.084,23 dari target minimal sebesar US\$ 13.962.395,22.

Selain penjelasan tentang capaian kinerja diatas maka perlu juga dilakukan analisa terhadap penggunaan sumber daya. Analisa ini bertujuan untuk melihat tingkat efisiensi

penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran. Analisis penggunaan sumber daya sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel II.13 Rencana, Realisasi dan Persentasi Realisasi Penganggaran 2020 – 2024 (Sasaran 3)
“Meningkatnya Ekspor Komoditi Non Tambang Maluku Utara”*

SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2020				TAHUN 2021				TAHUN 2022				TAHUN 2023				TAHUN 2024			
	RENSTRA (Rp. Juta)	DPA (Rp. Juta)	REALISASI (Rp. Juta)	%	RENSTRA (Rp. Juta)	DPA (Rp. Juta)	REALISASI (Rp. Juta)	%	RENSTRA (Rp. Juta)	DPA (Rp. Juta)	REALISASI (Rp. Juta)	%	RENSTRA (Rp. Juta)	DPA (Rp. Juta)	REALISASI (Rp. Juta)	%	RENSTRA (Rp. Juta)	DPA (Rp. Juta)	REALISASI (Rp. Juta)	%
Meningkatnya Ekspor Komoditi Non Tambang Maluku Utara	600	-	-	-	1.000	557.760	558	99,99	1.000	324	324	100	1.000	458	199	43,49	1.000	204	204	100

Sumber : Renstra Disperindag 2020-2024, DPPA, LAKIP 2020-2024, Disperindag Prov. Maluku, 2020-2024 (Diolah)

Tujuan 4 : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing industri Pengolahan Maluku Utara

Sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

*Tabel II.14 Sasaran dan Indikator Kinerja (Sasaran 4)
“Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing industri Pengolahan Maluku Utara”*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri Pengolahan Maluku Utara	Perkembangan PDRB Industri Manufaktur (%)
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Logam Dasar (%)

Sumber : Renstra Disperindag Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator kinerja dari sasaran “Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri Pengolahan Maluku Utara” sebagaimana tabel diatas jika dilakukan pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020-2024, maka capaiannya adalah sebagai berikut :

*Tabel II.15 Target dan Capaian Realisasi Kinerja 2020 –2024 (Sasaran 4)
“Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri Pengolahan Maluku Utara”*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020				TAHUN 2021				TAHUN 2022				TAHUN 2023				TAHUN 2024			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT
Sasaran 4. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing industri Maluku Utara	Perkembangan PDRB Industri Manufaktur	%	7,75	19,8	100	Baik	2,14	81,83	100,00	Baik	4,01	76,74	100	Baik	5,88	41,32	100	Baik	7,75	19,8	100	Baik
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Logam Dasar	%	2,47	2,81	100	Baik	2,35	2,1	89,36	Baik	2,39	1,71	71,55	Sedang	2,43	2,81	100	Baik	2,47	2,81	100	Baik

Sumber : Renstra dan Laporan Kinerja Tahun 2020-2024, Disperindag Provinsi Maluku Utara , Tahun 2020-2024

- Capaian untuk indikator kinerja “Perkembangan PDRB Industri Manufaktur” pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 7.75% dapat terealisasi sebesar 19,80%. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut adalah sebesar 100% atau berpredikat “Baik”, Capaian peningkatan realisasi “PDRB Industri Manufaktur”

pada tahun 2024 didorong oleh sub sektor Industri Kimia dengan peningkatan kinerja sebesar 63,9%, serta Industri Logam dasar sebesar 16,1%

Rincian kontribusi sub sektor terhadap kinerja Industri Pengolahan / Manufaktur tergambar pada table sebagai berikut :

Tabel II. 16 Rincian Perkembangan (per Sub Sektor) PDRB Industri Manufaktur

Lapangan Usaha (Subkategori)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Data Dasar = 2010)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	% Δ
C. Industri Pengolahan	14593,3	18196,6	19,80
C.1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	
C.2. Industri Makanan dan Minuman	366	392,2	6,7
C.3. Industri Pengolahan Tembakau	-	-	
C.4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	4,2	4,4	4,5
C.5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	
C.6. Industri Kayu, Barang dari kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	500,4	534,6	6,4
C.7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	5,8	6,1	4,9
C.8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	586,1	1621,7	63,9
C.9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-	-	
C.10. Industri Barang Galian bukan Logam	10,4	10,8	3,7
C.11. Industri Logam Dasar	13101,7	15607,3	16,1
C.12. Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik	1	1,1	9,1
C.13. Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	
C.14. Industri Alat Angkutan	8,4	8,8	4,5
C.15. Industri Furnitur	8,2	8,6	4,7
C.16. Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	1,2	1,2	-

Sumber : BPS Malut, 2025 (diolah)

- Capaian untuk indikator kinerja “Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Logam Dasar” pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 2.47% dapat terealisasi sebesar 4,23%. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut adalah sebesar 100% atau berpredikat “Baik”. Realisasi pencapaian indikator yang melebihi target ini disebabkan telah beroperasinya Industri kimia yang secara signifikan memberi dampak kontribusi yaitu sebesar 2,67% dari Total PDRB 2024 (pada tahun 2023 hanya sebesar 1,22%).

Rincian kontribusi per sub sektor dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel II.17 Rincian Kontribusi Per Sub Sektor Industri Pengolahan (Non Logam Dasar) Provinsi Maluku Utara

Lapangan Usaha (Subkategori)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		% Kontribusi Terhadap PDRB
	2023	2024	
C. Industri Pengolahan (Non Logam Dasar)	27505	4048,2	4,23
C.1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	
C.2. Industri Makanan dan Minuman	616,8	672,5	0,70
C.3. Industri Pengolahan Tembakau	-	-	
C.4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	6,4	6,9	0,01
C.5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	
C.6. Industri Kayu, Barang dari kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	695	752,5	0,79
C.7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	8,6	9,3	0,01
C.8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	1036,1	2560,4	2,67
C.9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-	-	
C.10. Industri Barang Galian bukan Logam	15,4	16,5	0,02
C.12. Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik	1,6	1,6	0,00
C.13. Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-	
C.14. Industri Alat Angkutan	11,8	12,7	0,01
C.15. Industri Furnitur	13,2	14,1	0,01
C.16. Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	1,6	1,7	0,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	85143,1	95787,7	

Sumber : BPS Maluku Utara, Maluku Utara Dalam Angka, 2025 (diolah)

Capaian kinerja dari sasaran “Perkembangan PDRB Industri Manufaktur” di tahun 2020-2024 sebagaimana data diatas jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, maka capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel II.18 Sasaran, Indikator Kinerja, Realisasi Kinerja (Sasaran 4)
“Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing industri Pengolahan Maluku Utara”

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020				TAHUN 2021				TAHUN 2022				TAHUN 2023				TAHUN 2024			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT
Sasaran 4. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing industri Maluku Utara	Perkembangan PDRB Industri Manufaktur	%	7,75	19,8	100	Baik	2,14	81,83	100,00	Baik	4,01	76,74	100	Baik	5,88	41,32	100	Baik	7,75	19,8	100	Baik
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Logam Dasar	%	2,47	2,81	100	Baik	2,35	2,1	89,36	Baik	2,39	1,71	71,55	Sedang	2,43	2,81	100	Baik	2,47	2,81	100	Baik

Sumber : Renstra Disperindag Prov. Malut 2020-2024, LAKIP 2020-2024, Disperindag Prov. Maluku Utara, 2020-2024 (Diolah)

Perbandingan realisasi kinerja sasaran “Perkembangan PDRB Industri Manufaktur” terhadap target akhir Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

Utara tahun 2020-2024 sebagaimana diatas menunjukkan bahwa indikator yang ada sudah memenuhi target akhir Renstra yaitu mencapai 100%.

Selain penjelasan tentang capaian kinerja perlu juga dilakukan analisa terhadap penggunaan sumber daya. Analisa ini bertujuan untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran. Analisis penggunaan sumber daya sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel II.19 Rencana, Realisasi dan Persentasi Realisasi Penganggaran 2020 – 2024 (Sasaran 4)
“Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri Pengolahan Maluku Utara”*

SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2020				TAHUN 2021				TAHUN 2022				TAHUN 2023				TAHUN 2024			
	RENSTRA (Rp. Juta)	DPA (Rp. Juta)	REALISASI (Rp. Juta)	%	RENSTRA (Rp. Juta)	DPA (Rp. Juta)	Realisasi (Rp. Juta)	%	RENSTRA (Rp. Juta)	DPA (Rp. Juta)	Realisasi (Rp. Juta)	%	RENSTRA (Rp. Juta)	DPA (Rp. Juta)	REALISASI (Rp. Juta)	%	RENSTRA (Rp. Juta)	DPA (Rp. Juta)	Realisasi (Rp. Juta)	%
Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri Maluku Utara	9.700	2.137	1.753	82,06	10.530	9.198	9.072	98,63	10.530	10.89	7.940	72,95	18.150	14.170	9.003	63,53	23.595	5.419	5.417	99,96

Sumber : Renstra Disperindag 2020-2024, DPPA, LAKIP 2020-2024, Disperindag Prov. Malut, Tahun 2020-2024 (Diolah)

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran yang terkait dengan pengembangan sektor industri dan perdagangan. Identifikasi kelompok sasaran pelayanan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak optimal bagi pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2021, serta mempertimbangkan karakteristik wilayah Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, kelompok sasaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok utama sebagai berikut:

2.1.4.1 Kelompok Sasaran Sektor Perindustrian

Sektor perindustrian di Maluku Utara memiliki karakteristik yang unik dengan dominasi industri pengolahan mineral, khususnya nikel, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB daerah. Namun demikian, upaya diversifikasi industri terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Tabel II.20 Kelompok Sasaran Pelayanan Sektor Perindustrian

No	Kelompok Sasaran	Karakteristik	Jenis Pelayanan
1	Industri Besar		
	a. Industri Pengolahan Mineral	Perusahaan pengolahan nikel dan emas Investasi > Rp 50 miliar Tenaga kerja > 100 orang	Fasilitasi perizinan Pembinaan industri hijau Koordinasi ekspor
	b. Industri Kimia & Farmasi	Produksi bahan kimia dasar, farmasi dan obat tradisional Kontribusi PDRB 2,67% (2024)	Standardisasi produk Fasilitasi teknologi Akses pembiayaan
	c. Industri Kayu & Turunannya	Pengolahan kayu log Furniture dan plywood Berorientasi ekspor	Promosi ekspor Peningkatan nilai tambah
2	Industri Kecil Menengah (IKM)		
	a. Pengolahan Hasil Pertanian	Pengolahan pala, cengkeh, kelapa Skala rumah tangga hingga menengah Tersebar di seluruh kabupaten	Pelatihan teknologi tepat guna Fasilitasi peralatan Akses pasar
	b. Pengolahan Hasil Perikanan	Ikan asap, abon, kerupuk Produk olahan rumput laut Mayoritas di wilayah pesisir	Pelatihan teknologi tepat guna Fasilitasi peralatan
	c. Kerajinan & Ekonomi Kreatif	Anyaman, tenun tradisional Produk berbasis budaya lokal Pelaku mayoritas perempuan	Pengembangan desain Fasilitasi pameran Pelatihan e-commerce
3	Calon Investor & Pengembang		
	a. Investor Domestik	Modal dalam negeri Fokus pada pengolahan SDA lokal Kemitraan dengan masyarakat	Informasi peluang investasi Fasilitasi perizinan OSS Insentif daerah
	b. Investor Asing	PMA dari China, Jepang, Korea Fokus industri mineral & kimia Investasi > USD 10 juta	Koordinasi dengan BKPM Koordinasi Jaminan keamanan investasi

Sumber : Disperindag Provinsi Maluku Utara, 2025

2.1.4.2 Kelompok Sasaran Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan di Maluku Utara menghadapi tantangan khusus terkait kondisi geografis kepulauan yang menyebabkan tingginya biaya logistik dan distribusi. Dengan 901 pulau yang tersebar, sistem perdagangan harus dirancang untuk memastikan ketersediaan barang dengan harga yang terjangkau di seluruh wilayah.

Tabel II.21 Matriks Kelompok Sasaran Pelayanan Sektor Perdagangan

Kelompok Sasaran	Kebutuhan Utama	Jenis Pelayanan
Pedagang Pasar Tradisional	Revitalisasi pasar Modal usaha Pelatihan manajemen	
Distributor Bapok	Gudang penyimpanan Subsidi transportasi Sistem informasi harga	Operasi pasar Monitoring harga Tol laut
Eksportir Komoditas	Akses pasar global Sertifikasi produk Fasilitasi logistik	Promosi dagang Pameran internasional
Pedagang Online/E-commerce	Pelatihan digital Akses internet Sistem pembayaran	Pelatihan digital Digital payment
Pengelola Pusat Perbelanjaan	Standar pelayanan Manajemen modern Promosi terpadu	

Sumber : Disperindag Provinsi Maluku Utara, 2025

2.1.4.3 Kelompok Sasaran Lintas Sektor

Kelompok sasaran lintas sektor merupakan pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan kedua sektor baik industri maupun perdagangan. Kelompok ini memerlukan pendekatan pelayanan yang terintegrasi dan komprehensif.

Gambar II.09 Peta Kelompok Sasaran Lintas Sektor



Sumber : Disperindag Provinsi Maluku Utara, 2025

a. Target Utama

Peta menampilkan **Konsumen & Masyarakat** sebagai pusat dengan populasi 650.000 jiwa yang menjadi target utama seluruh program dan layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara.

b. Kelompok Sasaran Primer

Kelompok sasaran Primer layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara Adalah :

- Pelaku Usaha maupun calon pelaku usaha disektor Perdagangan
- Pelaku Usaha maupun calon pelaku usaha di sektor Perindustrian

Kelompok ini bergerak di sektor industri dan perdagangan sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

c. Kelompok Pendukung

Instansi Pemerintah untuk koordinasi dan regulasi terdiri dari:

- ☒ Pemerintah Kabupaten/Kota: 10 unit
- ☒ OPD Provinsi: 44 unit
- ☒ Kementerian: 2 unit

Lembaga Pendidikan untuk pengembangan SDM mencakup:

- ☒ Perguruan Tinggi
- ☒ SMK
- ☒ BLK/LPK

Lembaga Keuangan untuk pembiayaan dan permodalan meliputi:

- ☒ Perbankan
- ☒ Koperasi
- ☒ Perusahaan *Financial Technology (Fintech)*

d. Kelompok Pendukung Tambahan

Asosiasi Usaha terdiri dari:

- ☒ APINDO
- ☒ KADIN

- ☑ Asosiasi Sektor

Media & IT meliputi:

- ☑ Media Massa
- ☑ Platform Digital
- ☑ ISP

Peta menunjukkan pola hubungan radial dengan konsumen dan masyarakat sebagai titik sentral. Semua kelompok sasaran terhubung melalui sistem koordinasi lintas sektor yang bertujuan menciptakan sinergi dalam pelayanan publik dan pengembangan ekonomi daerah. Setiap kelompok memiliki peran spesifik dalam mendukung peningkatan daya saing industri dan perdagangan Maluku Utara, dengan konsumen sebagai penerima manfaat utama dari seluruh aktivitas koordinasi lintas sektor ini.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara selaku unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang Perindustrian dan Perdagangan melalui perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengadministrasian di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Matriks berikut ini pemetaan permasalahan yang menunjukkan keterkaitan sistematis antara visi-misi kepemimpinan daerah dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target pembangunan sektor industri dan perdagangan Provinsi Maluku Utara periode 2025-2029.

a. Permasalahan Bidang Perindustrian

Untuk pemetaan permasalahan bidang Perindustrian bisa dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel II.21 Pemetaan Masalah Bidang Perindustrian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Kontribusi dan Diversifikasi Industri	70% share PDRB hanya dari 3 kabupaten (Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Konsentrasi industri tinggi pada sektor tertentu Kontribusi industri pengolahan non logam dasar masih terbatas	Belum optimalnya diversifikasi industri di seluruh wilayah Pengembangan industri hilir belum diimbangi dengan diversifikasi Transformasi struktural terlalu cepat tanpa pemerataan Fokus berlebihan pada industri pengolahan mineral
2	Rendahnya Daya Saing dan Inovasi Produk Industri	Minimnya produk industri lokal bersertifikasi SNI Rendahnya tingkat inovasi produk dan pengembangan desain Keterbatasan penerapan teknologi industri Kurangnya riset dan pengembangan (R&D) Belum optimalnya penerapan sistem manajemen kualitas	Daya saing mutu, desain, dan produk belum memadai Minimnya investasi untuk R&D Kurangnya exposure terhadap standar internasional Lemahnya kultur inovasi di kalangan pelaku industri
3	Keterbatasan Kapasitas SDM dan Keterampilan Teknis	Rata-rata upah buruh Rp2,3 juta (vs nasional Rp3,02 juta) Rendahnya produktivitas tenaga kerja Ketergantungan pada tenaga kerja asing untuk posisi teknis Minimnya kultur inovasi dan entrepreneurship	Rendahnya kemampuan SDM pelaku industri Terbatasnya program pendidikan vokasi sesuai kebutuhan industri Minimnya program pelatihan teknis berkelanjutan Brain drain tenaga terampil ke daerah lain
4	Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Penunjang Industri	Infrastruktur Transportasi: Akses jalan ke kawasan industri belum optimal Keterbatasan transportasi laut antar pula Fasilitas pelabuhan belum sepenuhnya mendukung Infrastruktur Energi: Ketersediaan listrik belum stabil dan merata Porsi EBT masih rendah Ketergantungan tinggi pada bahan bakar fosil Infrastruktur Digital: Jaringan telekomunikasi belum menjangkau seluruh kawasan Minimnya platform digital untuk industri 4. Fasilitas Pendukung: Kurangnya laboratorium uji terakreditasi Minimnya pusat riset dan pengembangan Terbatasnya fasilitas pendidikan vokasi	Belum memadainya sarana penunjang industri Investasi infrastruktur tidak merata Koordinasi pembangunan infrastruktur lemah Keterbatasan anggaran pembangunan Kondisi geografis kepulauan yang menantang

Penjabaran masalah pokok yang akan dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara selama lima tahun kedepan sebagaimana dirangkum pada tabel diatas adalah sebagai berikut : Sektor perindustrian di Provinsi Maluku Utara menghadapi berbagai tantangan struktural yang menghambat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan analisis mendalam terhadap kondisi eksisting, terdapat empat masalah pokok yang perlu mendapat perhatian serius dalam perencanaan pembangunan industri periode 2025-2029.

1. *Belum Optimalnya Kontribusi dan Diversifikasi Industri*

Struktur industri Maluku Utara menunjukkan ketimpangan yang signifikan, baik dari aspek geografis maupun sektoral. Kondisi ini tercermin dari beberapa indikator kunci:

a. *Konsentrasi Geografis yang Tinggi*

Sebanyak 70% kontribusi PDRB sektor industri hanya berasal dari 3 kabupaten, yaitu Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan Halmahera Utara. Ketiga kabupaten ini menjadi pusat aktivitas industri pengolahan mineral, khususnya nikel, yang mendominasi perekonomian daerah. Sementara itu, 7 kabupaten/kota lainnya memiliki kontribusi yang sangat minimal terhadap PDRB industri provinsi.

Konsentrasi geografis ini menciptakan kesenjangan pembangunan antar wilayah yang semakin melebar. Daerah-daerah di luar pusat industri mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingkat pengangguran yang lebih tinggi, dan akses terbatas terhadap peluang ekonomi. Kondisi ini bertentangan dengan semangat pemerataan pembangunan yang menjadi salah satu visi utama pemerintah daerah.

b. *Ketergantungan pada Sektor Tertentu*

Industri pengolahan di Maluku Utara didominasi oleh sektor pengolahan mineral, khususnya nikel. Meskipun sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, ketergantungan yang berlebihan pada satu sektor

menciptakan kerentanan ekonomi. Fluktuasi harga komoditas global dapat berdampak langsung pada stabilitas ekonomi daerah.

Data menunjukkan bahwa kontribusi industri pengolahan non logam dasar masih sangat terbatas, hanya berkisar 2-4% dari total PDRB. Padahal, Maluku Utara memiliki potensi sumber daya alam lain yang melimpah, seperti hasil perkebunan (pala, cengkeh, kelapa), perikanan, dan kehutanan yang belum diolah secara optimal.

c. Penurunan Laju Pertumbuhan

Yang lebih mengkhawatirkan adalah tren penurunan pertumbuhan industri pengolahan dari 77% pada tahun 2022 menjadi hanya 41% pada tahun 2023. Penurunan drastis ini mengindikasikan adanya masalah struktural dalam sektor industri yang perlu segera diatasi. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan ini antara lain:

- Menurunnya investasi baru di sektor industri
- Keterbatasan infrastruktur pendukung
- Regulasi yang belum mendukung pertumbuhan industri
- Persaingan dengan daerah lain yang lebih kompetitif

Akar Masalah:

1. Belum optimalnya diversifikasi industri di seluruh wilayah. Kebijakan pengembangan industri masih terfokus pada daerah-daerah yang sudah maju, tanpa upaya serius untuk mengembangkan potensi industri di daerah lain.
2. Pengembangan industri hilir belum diimbangi dengan diversifikasi. Fokus pada hilirisasi mineral tidak dibarengi dengan pengembangan industri pengolahan komoditas lain yang potensial.
3. Transformasi struktural terlalu cepat tanpa pemerataan. Pergeseran dari ekonomi berbasis pertanian ke industri terjadi terlalu cepat tanpa memperhatikan kesiapan infrastruktur dan SDM di berbagai daerah.
4. Fokus berlebihan pada industri pengolahan mineral. Kebijakan dan investasi terlalu terkonsentrasi pada sektor mineral, mengabaikan potensi sektor lain yang dapat memberikan nilai tambah dan lapangan kerja lebih luas.

2. *Rendahnya Daya Saing dan Inovasi Produk Industri*

Industri di Maluku Utara menghadapi tantangan serius dalam hal daya saing dan inovasi. Kondisi ini menjadi penghambat utama dalam penetrasi pasar nasional maupun internasional.

a. Minimnya Standardisasi Produk

Pada kondisi saat ini, produk industri lokal masih banyak yang belum memiliki sertifikasi standar wajib. Kondisi ini menyulitkan produk lokal untuk bersaing di pasar modern yang mensyaratkan standar kualitas tertentu. Tanpa sertifikasi yang memadai, produk industri Maluku Utara sulit untuk:

- Memasuki jaringan ritel modern
- Mengikuti tender pemerintah
- Bersaing di pasar ekspor
- Mendapatkan kepercayaan konsumen

b. Rendahnya Tingkat Inovasi

Industri lokal masih mengandalkan metode produksi tradisional dengan sedikit sekali inovasi, baik dalam hal:

- Inovasi Produk: Minimnya pengembangan produk baru atau variasi produk yang sesuai dengan tren pasar
- Inovasi Proses: Keterbatasan dalam adopsi teknologi produksi modern yang dapat meningkatkan efisiensi
- Inovasi Desain: Kemasan dan presentasi produk yang kurang menarik dibandingkan kompetitor
- Inovasi Bisnis Model: Masih mengandalkan cara-cara konvensional dalam pemasaran dan distribusi

c. Keterbatasan Penerapan Teknologi

Mayoritas industri, terutama IKM, masih menggunakan teknologi sederhana dengan produktivitas rendah. Beberapa kendala dalam adopsi teknologi meliputi:

- Keterbatasan modal untuk investasi teknologi
- Kurangnya pengetahuan tentang teknologi yang tersedia
- Tidak adanya pendampingan teknis dalam implementasi teknologi

- Resistensi terhadap perubahan dari pelaku industri tradisional
- d. Minimnya Riset dan Pengembangan (R&D)
- Aktivitas R&D di sektor industri Maluku Utara masih sangat minim. Tidak ada lembaga riset industri yang fokus pada pengembangan produk lokal. Akibatnya:
- Produk tidak berkembang sesuai kebutuhan pasar
 - Kualitas produk stagnan
 - Tidak ada diferensiasi produk yang signifikan
 - Ketergantungan pada teknologi dan formula dari luar
- e. Lemahnya Sistem Manajemen Kualitas
- Sebagian besar industri belum menerapkan sistem manajemen kualitas yang terstandar seperti ISO 9001, HACCP, atau GMP. Dampaknya:
- Kualitas produk tidak konsisten
 - Tingkat reject yang tinggi
 - Kepercayaan konsumen rendah
 - Sulit mendapatkan kontrak dengan buyer besar

Akar Masalah:

1. Daya saing mutu, desain, dan produk belum memadai. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya kualitas dan desain dalam persaingan pasar modern.
2. Minimnya investasi untuk R&D. Pelaku industri lebih fokus pada produksi rutin tanpa mengalokasikan dana untuk pengembangan produk.
3. Kurangnya exposure terhadap standar internasional. Isolasi geografis dan minimnya interaksi dengan pasar global membuat pelaku industri tidak terpapar dengan standar kualitas internasional.
4. Lemahnya kultur inovasi di kalangan pelaku industri. Mindset tradisional yang resisten terhadap perubahan masih mendominasi pelaku industri lokal.

3. Keterbatasan Kapasitas SDM dan Keterampilan Teknis

Sumber daya manusia merupakan faktor krusial dalam pengembangan industri. Namun, kondisi SDM industri di Provinsi Maluku Utara masih memiliki permasalahan/*gap* jika menilik dari kondisi ideal yang diharapkan.

a. Rendahnya Kualitas SDM Industri

Data menunjukkan bahwa 44,8% tenaga kerja di sektor industri hanya berpendidikan rendah atau tidak sekolah. Komposisi pendidikan yang rendah ini berdampak pada:

- Produktivitas kerja yang rendah
- Kesulitan dalam adopsi teknologi baru
- Tingginya tingkat kesalahan produksi
- Lambatnya proses pembelajaran dan peningkatan skill

b. Kesenjangan Upah yang Signifikan

Rata-rata upah buruh industri di Maluku Utara hanya Rp 2,3 juta, jauh di bawah rata-rata nasional Rp 3,02 juta. Rendahnya upah ini mencerminkan:

- Rendahnya produktivitas tenaga kerja
- Minimnya keterampilan khusus yang dimiliki pekerja
- Lemahnya posisi tawar pekerja
- Kurangnya insentif untuk peningkatan keterampilan

c. Ketergantungan pada Tenaga Kerja Asing

Untuk posisi-posisi teknis dan manajerial, banyak industri yang masih bergantung pada tenaga kerja asing. Kondisi ini menunjukkan:

- Kurangnya tenaga ahli lokal yang kompeten
- Lemahnya sistem pendidikan vokasi
- Minimnya program pelatihan industri
- Kurangnya transfer knowledge dari tenaga asing ke lokal

d. Minimnya Kultur Entrepreneurship

Sebagian besar tenaga kerja memiliki mindset sebagai pekerja/buruh, bukan sebagai entrepreneur. Hal ini menghambat:

- Pertumbuhan industri kreatif dan inovatif

- Munculnya startup industri
 - Pengembangan produk-produk baru
 - Semangat untuk continuous improvement
- e. *Brain Drain* ke Daerah Lain
- Tenaga kerja terampil cenderung mencari peluang di luar Maluku Utara karena:
- Terbatasnya peluang karir di daerah
 - Rendahnya kompensasi
 - Kurangnya fasilitas pengembangan diri
 - Minimnya apresiasi terhadap keahlian

Akar Masalah :

1. Rendahnya kemampuan SDM pelaku industri. Sistem pendidikan belum menghasilkan lulusan yang siap kerja di sektor industri.
 2. Terbatasnya program pendidikan vokasi sesuai kebutuhan industri. Kurikulum pendidikan vokasi tidak sinkron dengan kebutuhan riil industri.
 3. Minimnya program pelatihan teknis berkelanjutan. Tidak ada sistem pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pekerja.
 4. Brain drain tenaga terampil ke daerah lain. Tidak ada insentif yang memadai untuk mempertahankan tenaga terampil di daerah.
4. *Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Penunjang Industri*

Infrastruktur merupakan tulang punggung pengembangan industri. Sayangnya, kondisi infrastruktur di Maluku Utara masih belum memadai untuk mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan.

- a. *Infrastruktur Transportasi yang Belum Memadai*
- Akses Jalan: Kondisi jalan menuju kawasan-kawasan industri potensial masih belum representatif. Banyak jalan yang rusak, sempit, dan tidak mampu dilalui kendaraan besar. Hal ini meningkatkan biaya logistik dan menghambat distribusi bahan baku maupun produk jadi.

- **Transportasi Laut:** Sebagai provinsi kepulauan dengan 901 pulau, transportasi laut menjadi sangat vital. Namun, armada kapal yang tersedia sangat terbatas dengan frekuensi pelayaran yang tidak teratur. Kondisi ini menyebabkan:
 - Tingginya biaya transportasi antar pulau
 - Ketidakpastian jadwal pengiriman
 - Kesulitan dalam menjaga kontinuitas pasokan bahan baku
 - Hambatan dalam distribusi produk
 - **Fasilitas Pelabuhan:** Banyak pelabuhan yang belum memiliki fasilitas memadai seperti:
 - Dermaga yang terlalu kecil untuk kapal besar
 - Alat bongkar muat yang terbatas
 - Gudang penyimpanan yang tidak memadai
 - Sistem cold chain yang belum tersedia
- b. **Infrastruktur Energi yang Belum Stabil**
- **Ketersediaan Listrik:** Pasokan listrik belum stabil dan belum menjangkau seluruh wilayah potensial industri. Kondisi ini berpotensi mengganggu proses produksi dan meningkatkan biaya operasional karena penggunaan genset.
 - **Energi Terbarukan:** Porsi penggunaan energi terbarukan masih sangat rendah, padahal Maluku Utara memiliki potensi besar untuk pengembangan energi surya, angin, dan arus laut.
 - **Ketergantungan BBM:** Industri masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil yang harus didatangkan dari luar, meningkatkan biaya produksi dan *carbon footprint*
- c. **Infrastruktur Digital yang Terbatas**

- Jaringan Telekomunikasi: Coverage jaringan internet belum merata, terutama di daerah-daerah potensial industri di luar pusat kota. Hal ini menghambat:
 - Implementasi industri 4.0
 - Sistem monitoring produksi real-time
 - E-commerce dan digital marketing
 - Komunikasi bisnis yang efisien
 - Platform Digital: Belum ada platform digital terintegrasi untuk mendukung ekosistem industri seperti:
 - Marketplace B2B untuk industri
 - Sistem supply chain management
 - Platform kolaborasi industri
 - Digital payment system
- d. Fasilitas Pendukung yang Minim
- Laboratorium Uji: Minimnya ketersedianya laboratorium uji terakreditasi di daerah memaksa pelaku industri mengirim sampel ke luar daerah untuk pengujian kualitas, meningkatkan biaya dan waktu.
 - Pusat R&D: Tidak ada pusat riset dan pengembangan yang fokus pada pengembangan produk industri lokal.
 - Fasilitas Pendidikan Vokasi: Minimnya bengkel praktik, laboratorium, dan peralatan modern di sekolah-sekolah vokasi membuat lulusan tidak siap kerja.

Akar Masalah:

- Belum memadainya sarana penunjang industri. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan industri.
- Investasi infrastruktur tidak merata. Fokus pembangunan hanya di daerah-daerah yang sudah maju, dan terkesan mengabaikan daerah potensial lainnya.

- Koordinasi pembangunan infrastruktur lemah. Belum optimalnya sinkronisasi antara pembangunan infrastruktur dengan rencana pengembangan kawasan industri.
- Keterbatasan anggaran pembangunan. Alokasi anggaran untuk infrastruktur industri sangat terbatas dibandingkan kebutuhan.
- Kondisi geografis kepulauan yang menantang. Karakteristik wilayah kepulauan membuat pembangunan infrastruktur menjadi sangat mahal dan kompleks.

5. *Implikasi Masalah Terhadap Pembangunan Industri*

Keempat masalah pokok di atas saling terkait dan menciptakan lingkaran yang menghambat pertumbuhan industri. Konsentrasi industri yang tidak merata menyebabkan daerah-daerah potensial tidak berkembang. Rendahnya daya saing membuat produk lokal kalah bersaing. Keterbatasan SDM menghambat adopsi teknologi dan inovasi. Sementara infrastruktur yang tidak memadai meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing.

Untuk memutus lingkaran ini, diperlukan intervensi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi, meliputi:

1. Program diversifikasi industri berbasis potensi lokal di setiap wilayah
2. Peningkatan kapasitas inovasi dan standardisasi produk
3. Pengembangan SDM industri melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berkelanjutan
4. Pembangunan infrastruktur pendukung industri yang merata dan berkualitas

Tanpa penanganan serius terhadap keempat masalah pokok ini, target pertumbuhan industri yang inklusif dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam visi pembangunan daerah akan sulit tercapai.

b. Permasalahan Bidang Perdagangan

Untuk masalah bidang Perdagangan bisa dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel II.22 Permasalahan Bidang Perdagangan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Pasar Tradisional: Mayoritas belum memenuhi standar modern Fasilitas sanitasi dan kebersihan kurang memadai Sistem manajemen pasar belum profesional Fasilitas Penyimpanan: Minimnya gudang dan fasilitas penyimpanan Terbatasnya cold storage Belum adanya sistem cold chain yang terintegrasi Infrastruktur Logistik: Pusat distribusi provinsi dan regional belum terbangun Sistem transportasi barang belum efisien Tingginya biaya logistik antar pulau	Kondisi sarana prasarana belum memadai Alokasi anggaran pemeliharaan minim Lemahnya manajemen pengelolaan pasar Investasi swasta di sektor perdagangan terbatas
2	Tantangan Distribusi dan Logistik Kepulauan	Biaya Logistik Tinggi: Biaya transportasi antar pulau sangat tinggi Keterbatasan armada transportasi laut Frekuensi pelayaran tidak teratur ke pulau kecil Infrastruktur Transportasi: Kondisi pelabuhan belum semua memenuhi standar Terbatasnya fasilitas bongkar muat Akses jalan dari pelabuhan kurang memadai	Karakteristik kepulauan dengan Jarak antar pulau yang berjauhan Cuaca dan kondisi laut tidak menentu Skala ekonomi transportasi laut rendah Investasi infrastruktur maritim terbatas
3	Sistem Informasi Pasar Belum Terintegrasi	Asimetri informasi harga antar wilayah Minimnya data perdagangan akurat dan real-time Terbatasnya informasi peluang pasar Lemahnya koordinasi antar pelaku perdagangan	Belum terbangunnya sistem informasi pasar efektif Tidak ada marketing intelligence Infrastruktur TIK belum merata SDM pengelola data terbatas
4	Isu Perlindungan Konsumen dan Standardisasi	Pengawasan Kualitas: Minimnya cakupan pengawasan barang beredar maupun jasa. Kurang edukasi konsumen Terbatasnya mekanisme penyelesaian sengketa Standardisasi Produk: Banyak produk lokal yang belum memenuhi kewajiban sertifikasi Lemahnya sistem traceability	Kuantitas dan Kapasitas SDM pengawasan masih sangat terbatas Kesadaran konsumen masih rendah BPSK maupun LPSK belum ada yang terbentuk di Provinsi Maluku Utara Biaya sertifikasi tinggi bagi IKM Regulasi pengawasan belum efektif

Adapun penjabaran Permasalahan Bidang Perdagangan di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

1. *Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perdagangan*

a. Pasar Tradisional

- Mayoritas belum memenuhi standar modern: Sebagian besar dari pasar di 10 kabupaten/kota masih menggunakan sistem pengelolaan tradisional tanpa standar modern
- Fasilitas sanitasi dan kebersihan kurang memadai: Kondisi toilet, drainase, dan pengelolaan sampah belum sesuai standar kesehatan
- Sistem manajemen pasar belum profesional: Masih mengandalkan pengelolaan konvensional tanpa sistem informasi terintegrasi

b. Fasilitas Penyimpanan

- Minimnya gudang dan fasilitas penyimpanan: Kapasitas penyimpanan barang tidak sebanding dengan kebutuhan distribusi kepulauan
- Terbatasnya cold storage: Fasilitas pendingin untuk produk perikanan dan pertanian sangat terbatas
- Belum ada sistem cold chain terintegrasi: Rantai dingin dari produsen hingga konsumen belum terbangun secara sistematis

c. Infrastruktur Logistik

- Pusat distribusi regional belum terstandar: Belum ada standar operasional yang seragam untuk pusat distribusi
- Sistem transportasi barang belum efisien: Koordinasi antarmoda transportasi masih lemah
- Tingginya biaya logistik antar pulau: Biaya mencapai 2-3 kali lipat dibanding daerah daratan

Akar Masalah:

- Kondisi sarana prasarana belum memadai
- Alokasi anggaran pemeliharaan minim
- Lemahnya manajemen pengelolaan pasar
- Investasi swasta di sektor perdagangan terbatas

2. *Tantangan Distribusi dan Logistik Kepulauan*

a. Biaya Logistik Tinggi

- Biaya transportasi antar pulau sangat tinggi: Bahkan untuk komoditi tertentu bisa mencapai 40-50% dari harga jual produk
- Keterbatasan armada transportasi laut: Jumlah kapal dan jadwal pelayaran tidak memadai untuk 901 pulau
- Frekuensi pelayaran tidak teratur ke pulau kecil: Beberapa pulau hanya dilayani 1-2 kali seminggu

b. Infrastruktur Transportasi

- Kondisi pelabuhan belum semua memenuhi standar: Dari puluhan pelabuhan, banyak yang masih berupa dermaga sederhana
- Terbatasnya fasilitas bongkar muat: Peralatan loading/unloading masih manual di banyak lokasi
- Akses jalan dari pelabuhan kurang memadai: Koneksi pelabuhan ke pusat distribusi sering terkendala kondisi jalan

Akar Masalah:

- Karakteristik kepulauan dengan 901 pulau tersebar
- Jarak antar pulau yang berjauhan
- Cuaca dan kondisi laut tidak menentu
- Skala ekonomi transportasi laut rendah karena volume kargo terbatas
- Investasi infrastruktur maritim terbatas

3. *Sistem Informasi Pasar Belum Terintegrasi*

a. Asimetri Informasi

- Asimetri informasi harga antar wilayah: Perbedaan harga untuk komoditas sama bisa cukup besar antar pulau
- Minimnya data perdagangan akurat dan real-time
- Terbatasnya informasi peluang pasar: Pelaku usaha sulit mengakses informasi *demand* dan *supply*

b. Masih lemahnya koordinasi

- Lemahnya koordinasi antar pelaku perdagangan: Tidak ada platform komunikasi yang efektif
- Sistem distribusi belum terkoordinasi dengan baik : Masih sering terjadi penumpukan barang di satu tempat dan kelangkaan di tempat lain

Akar Masalah:

- Belum terbangunnya sistem informasi pasar yang efektif
- Tidak ada marketing intelligence yang memadai
- Infrastruktur TIK belum merata di seluruh wilayah
- SDM pengelola data masih terbatas
- Budaya sharing information masih rendah

4. *Isu Perlindungan Konsumen dan Standardisasi*

a. Pengawasan Kualitas

- Minimnya pengawasan kualitas produk retail: Pengawasan rutin hanya menjangkau <30%
- Kurangnya edukasi konsumen: Tingkat literasi konsumen tentang hak-haknya masih rendah
- Terbatasnya mekanisme penyelesaian sengketa: Belum adanya BPSK maupun LPSK yang terbentuk di Provinsi Maluku Utara

b. Standardisasi Produk

- Banyak produk lokal yang belum memenuhi kewajiban sertifikasi
- Minimnya sertifikasi halal: Penetrasi sertifikasi halal untuk produk lokal masih <20%
- Lemahnya sistem traceability: Sistem penelusuran asal produk belum terbangun

Akar Masalah:

- Kapasitas pengawasan terbatas
- SDM pengawas kurang memadai secara kuantitas dan kualitas

- Kesadaran konsumen masih rendah tentang standar produk
- Biaya sertifikasi tinggi bagi Pelaku usaha
- Regulasi pengawasan belum efektif implementasinya

2.2.2 Isu Strategis

A. Telaah RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029

Visi jangka menengah pada dasarnya merupakan Visi Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara. Adapun Visi Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang termuat dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029, yaitu: “ **MENJAGA KEBERAGAMAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN MALUKU UTARA BANGKIT, MAJU, SEJAHTERAH, BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN**” Visi ini mengandung arti sebagai berikut:

Visi ini mengandung arti sebagai berikut:

Menunjukkan perekat sakti Bhineka Tunggal Ika dalam setiap pandangan, langkahnya untuk menciptakan harmonisasi sosial, dan pluralisme.



MENJAGA KEBERAGAMAN

Mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pembangunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.



PEMERATAAN PEMBANGUNAN

Menunjukkan semangat untuk kebangkitan dan pemulihan, mencerminkan tekad untuk mengatasi berbagai tantangan dan kesulitan, serta berusaha untuk berkembang dan maju.



BANGKIT

Mengacu pada pengelolaan sumber daya dan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem.



MAJU

Menggambarkan tujuan untuk mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat, termasuk dalam hal ekonomi, sosial, dan kualitas hidup. Ini berarti adanya upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.



SEJAHTERA

Menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk distribusi sumber daya, kesempatan, dan perlakuan yang adil untuk semua pihak tanpa diskriminasi.



BERKEADILAN

Ini mencakup upaya menjaga dan melestarikan sumber daya alam, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, serta memastikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial dapat terus berlangsung tanpa merugikan generasi mendatang.



BERKELANJUTAN

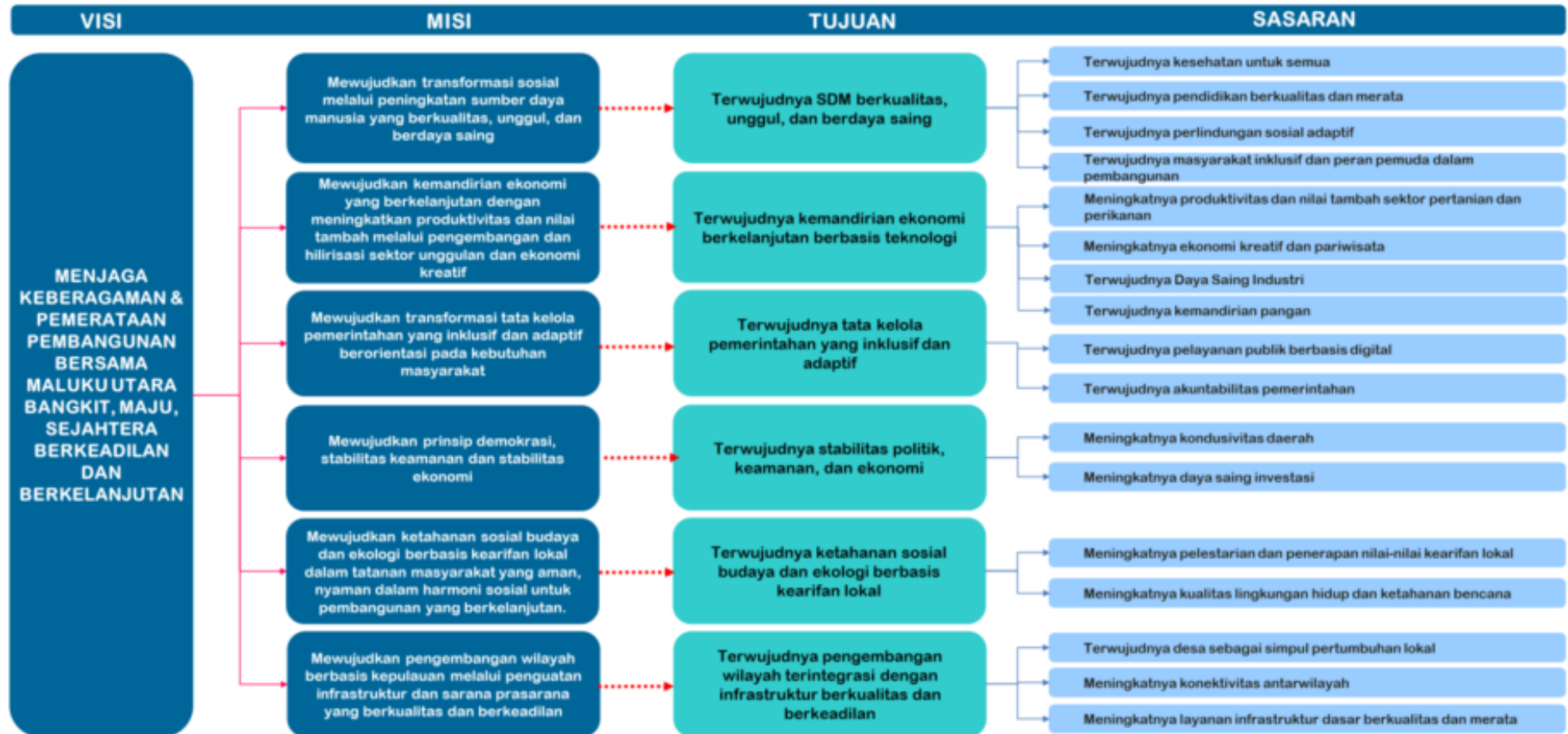
Untuk mewujudkan Visi RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029, diperlukan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah. Rumusan umum tersebut merupakan Misi RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029, yang meliputi:

1. Provinsi Maluku Utara yang Mewujudkan Transformasi Sosial melalui peningkatan sumberdaya Manusia yang berkualitas, unggul dan berdaya saing
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dengan meningkatkan produktifitas dan nilai tambah melalui penegembangan dan hilirisasi sektor unggulan dan ekonomi kreatif
3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan adaptif berorientasi pada kebutuhan masyarakat
4. Mewujudkan prinsip demokrasi, stabilitas keamanan dan stabilitas ekonomi
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan lokal dalam tatanan masyarakat yang aman, nyaman dalam harmoni sosial untuk pembangunan yang berkelanjutan.
6. Mewujudkan penegembangan wilayah berbasis kepulauan melalui penguatan infrastruktur berbasis sarana dan prasarana yang berkualitas dan berkeadilan.

Tujuan diturunkan dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan rangkaian kinerja untuk menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Maluku Utara selama lima tahun ke depan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar II.10 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029



Sumber : Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029, BAPPEDA Provinsi Maluku Utara, 2025

Tabel II.23 Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku 2024-2029 terkait tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

ASPEK	URAIAN			
VISI GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR	"MENJAGA KEBERAGAMAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN MALUKU UTARA BANGKIT, MAJU, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN"			
MISI	TUPOKSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PERMASALAHAN UTAMA	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
MISI 2: “Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah melalui pengembangan dan hilirisasi sektor unggulan dan ekonomi kreatif”	FUNGSI UTAMA: - Perumusan kebijakan teknis perindustrian dan perdagangan - Pembinaan dan pengembangan industri - Hilirisasi dan diversifikasi industri - Pengembangan produk unggulan daerah - Fasilitasi investasi industri dan perdagangan	PERMASALAHAN HILIRISASI: - Pertumbuhan industri pengolahan turun dari 77% (2022) menjadi 41% (2023) - Konsentrasi industri hanya di 3 kabupaten (70% share PDRB) - Belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan (pala, cengkeh, kelapa) - Ketergantungan pada ekspor bahan mentah - Minimnya industri pendukung dan jasa - Rendahnya nilai tambah produk lokal	FAKTOR PENDORONG: - Kebijakan hilirisasi mineral nasional - Kelimpahan SDA (nikel, perkebunan, perikanan) - Lokasi strategis di jalur perdagangan internasional - Momentum pertumbuhan ekonomi tinggi - Investasi besar di kawasan industri - Dukungan infrastruktur dari pusat	FAKTOR PENGHAMBAT: - Keterbatasan teknologi pengolahan - Akses pembiayaan yang terbatas - Infrastruktur pendukung belum memadai - Ketergantungan pada fluktuasi harga global - Regulasi yang belum sinkron - Kapasitas riset dan inovasi rendah
	FUNGSI KOORDINASI: - Koordinasi pengembangan iklim investasi - Fasilitasi kemitraan usaha - Promosi produk dan investasi - Pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen - Stabilisasi harga dan pasokan	PERMASALAHAN STABILITAS: - Fluktuasi harga komoditas yang tinggi - Ketimpangan pembangunan antar wilayah - Daya saing investasi belum optimal - Sistem distribusi belum efisien - Akses pasar terbatas untuk produk lokal - Koordinasi perdagangan antar daerah lemah	FAKTOR PENDORONG: - Stabilitas politik dan keamanan daerah - Dukungan kebijakan investasi - Potensi pasar ASEAN - Kerjasama dengan negara tetangga - Program stabilisasi harga dari pusat - Komitmen swasta berinvestasi	FAKTOR PENGHAMBAT: - Volatilitas pasar global - Persaingan regional yang ketat - Keterbatasan infrastruktur logistik - Biaya transaksi tinggi - Regulasi yang tidak sinkron - Kapasitas kelembagaan terbatas

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara, 2025

Tabel II.24 Ringkasan Analisis Strategis

ASPEK	KONDISI SAAT INI	KONDISI IDEAL	STRATEGI UTAMA
Pertumbuhan Ekonomi	Melambat dari 14,2% (2022) → 13,5% (2023)	Pertumbuhan stabil dan berkelanjutan	Diversifikasi industri dan hilirisasi
Pemerataan Pembangunan	70% PDRB dari 3 kabupaten	Distribusi ekonomi lebih merata	Pengembangan sentra industri di seluruh wilayah
Daya Saing SDM	44,8% lulusan SD/tidak sekolah di industri	SDM terampil dan bersertifikat	- Koordinasi lintas sektor guna pelaksanaan pelatihan vokasi berkelanjutan - Upgrading skill dan kemampuan SDM Industri daerah melalui pelatihan/bimbingan teknis industri
Infrastruktur	Konektivitas dan logistik terbatas	Sistem logistik terintegrasi	Koordinasi Pembangunan infrastruktur pendukung industri
Tata Kelola	Nilai SAKIPOP : 64,0	Meningkat	Digitalisasi dan reformasi birokrasi
Keberlanjutan	Risiko degradasi lingkungan tinggi	Industri ramah lingkungan	Implementasi praktik ESG dan ekonomi hijau

Sumber : Disperindag Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025

Matriks ini menunjukkan keterkaitan sistematis antara visi-misi kepemimpinan daerah dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target pembangunan sektor industri dan perdagangan Provinsi Maluku Utara periode 2025-2029.

B. Telaah RTRW Provinsi Maluku Utara 2013 - 2033

RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033 telah menetapkan kawasan-kawasan strategis dimana Kawasan strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Kawasan strategis tersebut meliputi :

- Kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- Kawasan strategis dari fungsi sosial dan budaya;
- Kawasan strategis pendayagunaan dari kepentingan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi; dan
- Kawasan strategis dari fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi pengembangan wilayah selama lima tahun terakhir maka arah pengembangan wilayah yang perlu ditempuh yaitu :

- Kawasan Ternate, Tidore, Sidangoli dan Sofifi sebagai kawasan strategis, tetap difokuskan pada kepentingan perekonomian, pendidikan, industri, dan pemerintahan, dengan penekanan pada:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur pendukung wilayah perkotaan di kota Sofifi;
 2. Pengembangan klaster industri pertanian, kelautan dan perikanan terpadu sebagai penunjang kawasan perkotaan Sofifi;
 3. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi antar moda dan sarana penyeberangan yang layak, aman dan terjangkau;
 4. Pengembangan sarana peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia untuk menunjang akselerasi industri kreatif di Kota Ternate dan Kota Tidore;
 5. Peningkatan konservasi air di Pulau Ternate;
 6. Revitalisasi pariwisata di Kota Ternate dan Kota Tidore;
- b. Kawasan Kepulauan Sula, yang meliputi Pulau Sulabesi, Pulau Mangoli dan Pulau Taliabu tetap difokuskan pada pengembangan sektor perkebunan dan kehutanan, dengan mempertimbangkan adanya potensi unggulan wilayah lainnya, yang diarahkan pada:
1. Pengembangan prasarana utama untuk kegiatan industri seperti listrik, air bersih, dan telekomunikasi;
 2. Peningkatan prasarana penunjang lainnya, seperti jalan raya dan penyeberangan, pelabuhan laut, dan pelabuhan udara;
 3. Pengembangan sumber daya manusia dengan penekanan pada peningkatan produktifitas sektor pertanian dan perkebunan termasuk kelautan dan perikanan;
 4. Peningkatan produksi perkebunan dan melakukan peremajaan tanaman perkebunan serta diversifikasi tanaman perkebunan.
- c. Kawasan Pulau Bacan yang dikembangkan pada sektor industri perikanan dan industri pengolahan kayu serta kehutanan, dengan arahan yang ditekankan pada:
1. Pengembangan prasarana utama untuk kegiatan industri;
 2. Peningkatan prasarana penunjang lain (jalan dan penyeberangan, dan pelabuhan laut);
 3. Pengembangan sumber daya manusia;
 4. Pengembangan/perbaikan teknologi penangkapan ikan;
- d. Kawasan Halmahera Selatan meliputi Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Timur dikembangkan pada sektor perkebunan yang diarahkan pada:
1. Pengembangan transportasi laut sehingga dapat meningkatkan hubungan kawasan ini dengan kawasan sekitarnya yang akan memudahkan penyaluran hasil-hasil produksi perkebunan kawasan ini dengan pusat pengolahannya di Pulau Bacan;
 2. Pengembangan transportasi darat untuk meningkatkan aksesibilitas intra wilayah (antara Gane Barat dan Gane Timur);
 3. Meningkatkan produktivitas perkebunan.

- e. Kawasan Strategis Weda meliputi Weda dan sekitarnya diprioritaskan pada rencana pengembangan kegiatan (eksploitasi) pertambangan nikel yang diarahkan pada:
 - 1. Pengembangan kawasan pertambangan yang bersinergis dengan aspek rencana tata ruang dan lingkungan di sekitarnya sehingga dapat mencegah adanya konflik tata ruang dan kerusakan lingkungan;
 - 2. Pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan sosial masyarakat di sekitarnya yang berkaitan erat dengan kegiatan penambangan sehingga dapat menghindarkan adanya konflik sosial dan kegiatan ekonomi yang bersifat enclave;
 - 3. Pengembangan rencana tata ruang kawasan yang lebih detail pada kawasan inti dan penunjang.
- f. Kawasan Strategis Morotai tetap dikembangkan untuk sektor Pertahanan Keamanan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pariwisata yang diarahkan pada:
 - 1. Pengembangan Pulau Morotai sehingga mendukung fungsinya sebagai kawasan pertahanan dan keamanan, yang merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
 - 2. Pengembangan Pulau Morotai untuk kegiatan perikanan dan kelautan;
 - 3. Pengembangan Pulau Morotai untuk kegiatan pertanian lahan kering/perkebunan dan pertanian lahan basah sebagai basis ekonomi lokal;
 - 4. Pengembangan prasarana perhubungan laut dan udara;
 - 5. Pengembangan prasarana perhubungan darat dan penyeberangan untuk meningkatkan aksesibilitas ke wilayah lain, khususnya ke Loloda (Pulau Halmahera);
 - 6. Pengembangan pariwisata.
- g. Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil yaitu Halmahera, Halmahera Barat dan Halmahera yang dalam RTRW diarahkan pengembangannya pada sektor pertanian tanaman pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional dan provinsi, dengan menyesuaikan kondisi pengembangan wilayah terkini:
- h. Kawasan Strategis Halmahera Utara, Halmahera Barat dan Halmahera yang dalam RTRW diarahkan pengembangannya pada sektor pertanian tanaman pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional dan provinsi, dengan menyesuaikan kondisi pengembangan wilayah terkini:
 - 1. Pengembangan Kawasan Industri Buli untuk hilirisasi pertambangan melalui partisipasi sektor swasta; dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
 - 2. Pengembangan sentra-sentra produksi pangan dan perkebunan yang lebih terpadu;
 - 3. Peningkatan hilirisasi hasil tanaman pangan dan perkebunan.
- i. Kawasan Pulau Gebe yang dalam RTRW diarahkan pada perbaikan kualitas lingkungan pasca penambangan Nikel, menyesuaikan perkembangan saat ini diarahkan pada

peningkatan hilirisasi pertambangan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan fungsi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

- j. Kawasan Pulau Obi diarahkan pada sektor pertambangan, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan fungsi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

C. Telaah KLHS RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029

Ketimpangan antarwilayah di daerah kepulauan seperti di Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu isu strategis yang sangat mendesak untuk diatasi dalam 5 tahun ke depan. Tantangan geografis menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketimpangan antarwilayah di provinsi Maluku Utara. Jarak antar pulau yang jauh, terpisah oleh laut, sulitnya akses transportasi, dan keterbatasan sumber daya alam di beberapa wilayah menjadikan pembangunan di daerah yang satu berjalan lebih lambat dibandingkan dengan wilayah di daratan utama atau di pulau- pulau besar. Akses yang sulit ini menyebabkan biaya logistik menjadi sangat tinggi, yang pada akhirnya berdampak pada harga barang dan jasa yang lebih mahal serta minimnya ketertarikan investasi dari sektor swasta.

Keterbatasan infrastruktur konektivitas menjadi kendala serius dalam mempercepat pembangunan di provinsi Maluku Utara, baik saat ini maupun dalam 5 tahun ke depan. Keterbatasan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas umum lainnya mengakibatkan sulitnya mobilitas penduduk dan barang, serta membatasi akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur utilitas berbasis jaringan seperti air bersih dan energi terutama listrik. Selain itu, infrastruktur digital seperti jaringan internet yang belum merata juga memperburuk kesenjangan akses informasi dan teknologi, yang semakin memperlebar jurang ketimpangan antarwilayah.

Tabel II.25 Pemetaan Isu Strategis Provinsi Maluku Utara (KLHS)

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
▪ Kehutanan ▪ Perkebunan ▪ Pertambangan ▪ Kelautan dan perikanan ▪ Pariwisata	Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	▪ Optimalisasi kualitas SDM melalui peningkatan infrastruktur kesehatan dan pendidikan ▪ Optimalisasi penyediaan lapangan kerja pada sektor basis (potensi SDA)	▪ Kesehatan global dan pandemi ▪ Migrasi dan urbanisasi	▪ Rendahnya produktivitas ▪ Rendahnya kualitas sumber daya manusia ▪ Pergeseran struktur kelas menengah ▪ Kebutuhan hidup tinggi pada kelas menengah	▪ TPT tertinggi di atas pendidikan dasar ▪ IPM masih rendah ▪ Pekerja sektor industri belum sejahtera	Daya Saing Sumber Daya Manusia
	Momentum pertumbuhan ekonomi belum dimanfaatkan secara optimal	▪ Pengelolaan potensi SDA secara mandiri, kreatif, inovatif, dan produktif ▪ Perlindungan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup (kelautan, pertambangan, dan pertanian)	Transformasi teknologi dan disrupsi digital		▪ Pertumbuhan ekonomi melambat ▪ Pengembangan kawasan industri belum inklusif ▪ Nilai tambah pertanian rendah	Ekonomi Bertumpu pada Sektor Primer dan Hilirisasi Industri

Sumber : Ranhir RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029 , BAPPEDA Provinsi Maluku Utara, 2025. Diolah,

D. Telaah RENSTRA Kementerian Perindustrian 2025-2029

Arah kebijakan pembangunan industri nasional sesuai Rancangan Renstra Kementerian Perindustrian 2025-2029 difokuskan pada peningkatan kontribusi sektor industri dalam perekonomian, melalui hilirisasi sumber daya alam, peningkatan produktivitas dan daya saing, serta penerapan prinsip industri hijau dan digitalisasi industri.

Permasalahan strategis yang dihadapi sektor industri nasional, yaitu:

1. Tingkat utilisasi kapasitas industri yang belum optimal.

Beberapa sektor mengalami kendala bahan baku, rendahnya permintaan pasar, dan dampak perubahan iklim terhadap sektor berbasis pertanian seperti kelapa dan pangan olahan

2. Ketimpangan kontribusi industri antarwilayah.

Konsentrasi industri masih terpusat di Pulau Jawa, sementara nilai tambah industri di luar Jawa baru mencapai sekitar 32,3% dari total nasional

3. Perlambatan aliran investasi industri (FDI)

Walaupun nominal investasi meningkat, secara per kapita pertumbuhannya stagnan sejak 2013 akibat masih tingginya tingkat restriksi terhadap kepemilikan asing

4. Keterbatasan penguasaan teknologi dan riset inovasi industri

Transformasi digital dan pemanfaatan teknologi tinggi masih terkendala oleh rendahnya kemampuan inovasi, riset terapan, serta keterbatasan SDM industri

5. Rendahnya tingkat substitusi impor bahan baku dan barang modal

Rasio impor bahan baku terhadap PDB industri nonmigas masih tinggi (sekitar 40%), menunjukkan ketergantungan yang besar pada pasokan luar negeri

6. Tantangan menuju industri hijau dan rendah karbon

Perubahan iklim dan tuntutan global terhadap produk ramah lingkungan mendorong perlunya transisi menuju industri berkelanjutan

7. Kualitas SDM industri yang belum merata

Masih terbatasnya tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi digital dan vokasional sesuai kebutuhan industri 4.0

. Sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan global, beberapa isu strategis yang menjadi fokus Renstra Kementerian Perindustrian 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Tabel II.26 Isu strategis Bidang Perindustrian 2025–2029

Isu Strategis Nasional	Uraian
1. Hilirisasi dan Aglomerasi Industri	Penguatan rantai nilai industri berbasis sumber daya alam unggulan (nikel, tembaga, sawit, kelapa, rumput laut) serta pengembangan kawasan industri tematik di luar Jawa.
2. Digitalisasi Industri 4.0	Transformasi digital melalui penerapan <i>smart manufacturing</i> , <i>industrial IoT</i> , dan peningkatan kompetensi SDM digital.
3. Pengembangan Industri Hijau	Penerapan efisiensi energi, ekonomi sirkuler, dan sertifikasi industri hijau untuk menekan emisi karbon serta memperluas akses pasar hijau.
4. Penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Fasilitasi teknologi, pembiayaan, dan kemitraan agar IKM menjadi bagian dari rantai pasok industri besar.
5. Pemerataan Pembangunan Industri Antarwilayah	Peningkatan kontribusi nilai tambah industri di luar Jawa, termasuk pengembangan kawasan industri di Maluku Utara dan kawasan timur Indonesia.
6. Peningkatan Investasi Industri dan <i>Easy of Doing Business</i>	Reformasi regulasi dan perizinan industri untuk menarik investasi dan mempercepat pembangunan kawasan industri.
7. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN/PDN)	Optimalisasi P3DN dalam pengadaan pemerintah dan industri strategis.
8. Pengembangan SDM Industri dan Pendidikan Vokasi	Link and match antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri untuk mencetak tenaga kerja industri yang kompeten dan adaptif.

Sumber : Rancangan Awal RENSTRA Kementerian Perindustrian 2025-2029, 2025, diolah

E. Telaah RENSTRA Kementerian Perdagangan 2025-2029

Kementerian Perdagangan berperan sebagai penggerak sektor perdagangan nasional melalui penguatan pasar domestik, perluasan pasar ekspor, serta penguatan pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Secara umum, arah kebijakan Renstra Kementerian Perdagangan diarahkan pada lima agenda utama:

- Perluasan pasar ekspor barang dan jasa, melalui diversifikasi produk dan negara tujuan ekspor.

- Penguatan pasar dalam negeri dan distribusi barang, guna menjamin stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok.
- Peningkatan perlindungan konsumen dan tertib niaga, dengan memperkuat regulasi, pengawasan, dan standardisasi produk.
- Transformasi digital perdagangan, termasuk penguatan ekosistem e-commerce dan digitalisasi pasar rakyat.
- Peningkatan kualitas tata kelola dan sumber daya manusia perdagangan, agar adaptif terhadap dinamika ekonomi global.

Terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi sektor perdagangan, yaitu sebagai berikut :

1. Struktur ekspor masih didominasi produk mentah sehingga belum memberikan nilai tambah optimal bagi perekonomian nasional.
2. Keterbatasan infrastruktur logistik dan konektivitas antarwilayah menyebabkan disparitas harga dan biaya distribusi yang tinggi.
3. Belum meratanya digitalisasi perdagangan terutama di kalangan UMKM, pasar rakyat, dan pelaku usaha kecil di daerah.
4. Ketimpangan daya saing antar daerah, dengan konsentrasi aktivitas perdagangan dan ekspor masih terpusat di Pulau Jawa.
5. Fluktuasi harga pangan dan energi global yang berdampak pada stabilitas harga kebutuhan pokok di dalam negeri.
6. Keterbatasan kapasitas SDM dan literasi perdagangan internasional dalam menghadapi tantangan global dan perubahan teknologi.

Isu strategis yang menjadi perhatian Kementerian Perdagangan dan memiliki relevansi langsung bagi pelaksanaan pembangunan perdagangan daerah adalah :

1. Transformasi Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon

Perubahan arah pasar global menuju produk ramah lingkungan menuntut penyesuaian kebijakan industri dan perdagangan nasional serta daerah.

2. Digitalisasi Perdagangan dan Ekonomi Digital

Penguatan ekosistem e-commerce dan literasi digital pelaku usaha menjadi keharusan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi.

3. Diversifikasi Pasar Ekspor dan Diplomasi Perdagangan Internasional

Upaya membuka akses pasar baru melalui perjanjian perdagangan internasional seperti CEPA, CPTPP, dan BRICS.

4. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri dan Stabilitas Harga

Pengendalian inflasi, distribusi logistik, dan integrasi pasar domestik menjadi faktor kunci menjaga stabilitas ekonomi daerah.

5. Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Perdagangan

Peningkatan kompetensi aparatur dan pelaku usaha agar mampu menghadapi tantangan global, seperti perdagangan digital dan ekonomi hijau.

Dalam mendukung sasaran nasional, terdapat beberapa arah kebijakan strategis antara lain:

Tabel II.27 Arah Kebijakan Strategis Bidang Perdagangan

Bidang Fokus		Arah Kebijakan Kementerian Perdagangan	Relevansi dan Implikasi bagi Daerah
Perdagangan Negeri	Luar	Meningkatkan perluasan pasar ekspor barang dan jasa.	Mendorong ekspor produk unggulan daerah (perikanan, hasil tambang, produk olahan kelautan) serta peningkatan nilai tambah industri.
Perdagangan Negeri	Dalam	Meningkatkan ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok.	Penguatan sistem distribusi antarwilayah dan pengendalian disparitas harga di Maluku Utara.
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga		Penguatan pengawasan dan standardisasi produk.	Peningkatan kapasitas pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.
Digitalisasi Perdagangan		Penguatan sistem informasi perdagangan dan e-commerce.	Pengembangan marketplace daerah, digitalisasi pasar rakyat, dan peningkatan literasi digital bagi UMKM.
Pengembangan SDM dan Tata Kelola		Meningkatkan kapabilitas SDM perdagangan dan akuntabilitas kelembagaan.	Pelatihan aparatur dan pelaku usaha untuk menghadapi perubahan teknologi dan tuntutan global.

Sumber : Rancangan Awal RENSTRA Kementerian Perdagangan 2025-2029, 2025, diolah

Penentuan isu-isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024-2025, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari:

- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Telaah sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Kementerian Perdagangan;
- c. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029

Tabel II.28 Isu Strategis Bidang Perindustrian Dan Perdagangan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Cadangan nikel terbesar dunia ($\pm 40\%$ cadangan global) Komoditas pala dan cengkeh unggulan dunia Populasi IKM yang tersebar di 10 Kab/Kota Lokasi strategis jalur perdagangan internasional Potensi energi terbarukan sangat besar	70% kontribusi PDRB hanya dari 3 kabupaten Pertumbuhan industri pengolahan menurun drastis dari 77% (2022) $\rightarrow$ 41% (2023) Kontribusi industri pengolahan non logam dasar baru 4,23% Masih dominannya ekspor bahan mentah tanpa pengolahan lanjutan Belum optimalnya hilirisasi komoditas perkebunan	Kondisi geografis 901 pulau tersebar luas Dominasi industri ekstraktif mineral Ketergantungan tinggi pada ekspor bahan mentah Disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah Transformasi struktural ekonomi terlalu cepat	Revolusi Industri 5.0 dan digitalisasi global Transisi energi menuju Net Zero Emission 2050 Restrukturisasi rantai pasok global pasca pandemi Kompetisi nilai tambah dalam rantai nilai global Proliferasi FTA dan regionalisme ekonomi	Program Making Indonesia 4.0 Kebijakan larangan ekspor bahan mentah Roadmap hilirisasi mineral nasional Target kontribusi manufaktur 25% PDB Program transformasi digital Indonesia 2045	Kerjasama BIMP-EAGA dalam pengembangan ekonomi Konektivitas maritim ASEAN dan Indo-Pasifik Integrasi rantai nilai regional ASEAN Kerja sama perdagangan dengan negara tetangga Regional comprehensive economic partnership	ISU STRATEGIS 1: BELUM OPTIMALNYA HILIRISASI DAN DIVERSIFIKASI INDUSTRI BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN
Bonus demografi dengan 650.000 jiwa usia produktif 8 perguruan tinggi dan 25 SMK tersedia 15 BLK/LPK untuk pengembangan keterampilan Tradisi maritim dan perdagangan turun temurun Potensi SDM kreatif berbasis budaya lokal	44,8% pekerja industri berpendidikan Rendah Rata-rata upah buruh Rp 2,3 juta vs nasional Rp 3,02 juta • Ketergantungan pada tenaga kerja asing untuk posisi teknis Minimnya program pelatihan teknis berkelanjutan Brain drain tenaga terampil ke daerah lain	Kultur inovasi dan entrepreneurship masih rendah Skills mismatch antara industri dan pendidikan Terbatasnya instruktur dengan kompetensi memadai Akses pelatihan terbatas untuk daerah kepulauan Gap teknologi antara generasi pekerja	Revolusi keterampilan (skills revolution) Masa depan pekerjaan dan otomatisasi Konsep lifelong learning dan reskilling Demand tinggi untuk digital skills Pergeseran menuju knowledge economy	Program link and match pendidikan vokasi Sistem sertifikasi kompetensi nasional Kebijakan pengembangan human capital Program digital talent development Revitalisasi pendidikan vokasi	Mobilitas tenaga kerja terampil ASEAN Sistem sertifikasi regional yang mutual Kerja sama teknis antar negara ASEAN Knowledge sharing dan best practices Regional training and development	ISU STRATEGIS 2: RENDAHNYA KUALITAS DAN DAYA SAING SDM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
901 pulau dengan potensi ekonomi maritim Jalur pelayaran internasional strategis Akses ke program Tol Laut nasional Pelabuhan-pelabuhan strategis tersebar Tradisi perdagangan antar pulau kuat	Biaya logistik sangat tinggi 40-50% dari harga jual Disparitas harga barang antar pulau 100-200% Keterbatasan armada transportasi laut dan jadwal tidak teratur Kondisi pelabuhan belum semua memenuhi standar Minimnya fasilitas cold storage dan cold chain	Karakteristik kepulauan yang sangat menantang Cuaca dan kondisi laut tidak menentu Jarak antar pulau yang sangat berjauhan Skala ekonomi transportasi laut rendah Infrastruktur maritim masih terbatas	Disrupsi rantai pasok global Tren just-in-time delivery Pertumbuhan e-commerce yang eksplosif Teknologi cold chain dan smart logistics Digitalisasi sistem logistik global	Program pengurangan biaya logistik nasional Implementasi program Tol Laut Pengembangan konektivitas maritim Pembangunan national logistic gateway Digitalisasi sistem distribusi	Konektivitas ASEAN dan Indo-Pasifik Pengembangan hub logistik regional Fasilitasi perdagangan lintas batas Kerja sama maritim regional Integrasi sistem transportasi ASEAN	ISU STRATEGIS 3: BELUM EFISIENNYA SISTEM DISTRIBUSI DAN LOGISTIK KEPULAUAN
BPSK dan LPKSM sebagai basis perlindungan belum terbentuk di Maluku Utara Potensi produk unggulan berkualitas Sistem pengawasan dasar sudah ada Kesadaran konsumen mulai tumbuh	Pengawasan kualitas produk retail masih terbatas Sertifikasi SNI dan halal untuk IKM masih rendah Asimetri informasi harga antar wilayah sangat tinggi Mekanisme penyelesaian sengketa terbatas Edukasi konsumen belum optimal	Jangkauan pengawasan sangat luas (901 pulau) Biaya sertifikasi tinggi bagi UMKM Akses informasi pasar terbatas Kapasitas institusi perlindungan masih terbatas Koordinasi antar lembaga belum optimal	Tren perlindungan konsumen yang menguat Standardisasi produk internasional Tuntutan transparansi informasi Digital consumer rights Global quality assurance systems	Infrastruktur mutu nasional Sistem jaminan halal nasional Undang-undang perlindungan konsumen Pengawasan produk beredar Sistem informasi konsumen	Perlindungan konsumen ASEAN Mutual recognition agreement Standar regional yang harmonis Aturan perdagangan lintas batas Kerja sama pengawasan regional	ISU STRATEGIS 4: LEMAHNYA SISTEM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN STANDARDISASI PRODUK

Sumber : Disperindag Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Gubernur Maluku Utara tahun 2025-2029 yaitu "Menjaga Keberagaman dan Pemerataan Pembangunan Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan", serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara, maka tujuan jangka menengah yang ditetapkan adalah:

"Mewujudkan industri dan perdagangan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Maluku Utara"

Tujuan ini mencerminkan komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk:

1. Meningkatkan daya saing produk industri dan perdagangan daerah
2. Memastikan pembangunan industri dan perdagangan yang inklusif bagi seluruh pelaku usaha
3. Menerapkan prinsip keberlanjutan dalam pengembangan industri dan perdagangan
4. Mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah kepulauan

Adapun indikator tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara 2025-2029 adalah sebagai berikut :

"Kontribusi PDRB Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)"

3.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang mengintegrasikan urusan perindustrian dan perdagangan:

Sasaran 1 : Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah industri pengolahan berbasis komoditas unggulan

Sasaran ini difokuskan pada pengembangan industri pengolahan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal melalui hilirisasi dan diversifikasi industri. Adapun indikator kinerja sasaran ini adalah :

“Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)”

Sasaran 2: Meningkatnya Efisiensi Distribusi dan Kinerja Perdagangan untuk Mendukung Stabilitas Ekonomi

Sasaran ini difokuskan pada pengembangan sistem perdagangan yang efisien, merata, dan mampu menjaga stabilitas harga serta melindungi konsumen. Adapun indikator kinerja sasaran ini adalah :

“Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)”

Tabel III.01 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)							(10)
Terwujudnya daya saing industri dan perdagangan (Sasaran 2.1.3 RPJMD)	T1: Mewujudkan industri dan perdagangan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)	44,36	44,37	44,38	44,39	44,40	44,41	Sesuai Target RPJMD
		S1.1: Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah industri pengolahan berbasis komoditas unggulan daerah	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))	34.73	35.12	35.5	35.6	35.7	35.8	Sesuai Target RPJMD
		S1.2: Meningkatnya kapasitas dan pertumbuhan sektor perdagangan yang efisien dan berdaya saing	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)	9,5 - 10,5	9,5 - 10,5	9,5 - 10,5	9,5 - 10,5	9,5 - 10,5	9,5 - 10,5	Sesuai Target RPJMD
		S1.3. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Nilai)	64.21	64.24	64.27	64.30	64.44	65.00	Sesuai Target RPJMD

Sumber : Disperindag Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025

3.3 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara merumuskan strategi-strategi berikut:

Strategi 1: Mewujudkan industri dan perdagangan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan

Strategi 1.1: Diversifikasi dan Hilirisasi Industri Berbasis Komoditas Unggulan

- Mengembangkan industri pengolahan pala, cengkeh, dan kelapa di sentra-sentra produksi
- Mendorong hilirisasi mineral dengan nilai tambah tinggi dan ramah lingkungan
- Memfasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan
- Mengembangkan klaster industri berbasis komoditas unggulan

Strategi 1.2: Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Industri

- Menyelenggarakan program pelatihan teknis dan manajerial berkelanjutan
- Mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga vokasi
- Mendorong program magang dan transfer teknologi dari industri besar ke IKM

Strategi 1.3: Penguatan Infrastruktur dan Ekosistem Industri

- Mengembangkan kawasan industri terintegrasi di lokasi strategis
- Koordinasi lintas sektor penyediaan infrastruktur energi dan utilitas industri
- Mendorong pembangunan laboratorium uji dan pusat inovasi industri
- Mengembangkan sistem informasi industri terintegrasi

Strategi 1.4: Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan

- Mendorong penerapan prinsip industri hijau dan ekonomi sirkular
- Mengembangkan industri kreatif berbasis kearifan lokal
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya produk organik dan ramah lingkungan
- Mengimplementasikan insentif untuk industri berkelanjutan

Strategi 2: Meningkatkan kapasitas dan pertumbuhan sektor perdagangan yang efisien dan berdaya saing,

Strategi 2.1: Optimalisasi Sistem Distribusi dan Logistik Kepulauan

- Mengembangkan pusat distribusi provinsi / regional di titik dan pulau-pulau strategis
- Koordinasi peningkatan kualitas dan kapasitas armada transportasi laut demi kelancaran efektifitas dan efisiensi distribusi/logistik perdagangan Maluku Utara
- Koordinasi dan pelaksanaan implementasi sistem *cold chain* untuk produk perikanan dan pertanian
- Optimalisasi program tol laut untuk efisiensi distribusi

Strategi 2.2: Akselerasi Transformasi Digital Perdagangan

- Mendorong tumbuh dan berkembangnya pemanfaatan *marketplace* bagi produk lokal Maluku Utara
- Mendorong implemetansi digitalisasi IKM serta pelaku usaha perdagangan termasuk para pedagang di pasar tradisional
- Mendorong implementasi dan penerapan sistem pembayaran digital terintegrasi
- Mengembangkan dan atau mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi pasar real-time

Strategi 2.3: Penguatan Akses Pasar dan Promosi Produk Lokal

- Memfasilitasi penetrasi produk lokal ke pasar modern
- Menyelenggarakan pameran dagang dan misi dagang
- Mengembangkan branding produk unggulan daerah
- Memfasilitasi kemitraan B2B dan B2C

Strategi 2.4: Penguatan Sistem Perlindungan Konsumen dan Standardisasi

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen
- Pengawasan, koordinasi pembinaan dalam rangka sertifikasi SNI, halal serta pemenuhan standar edar lainnya bagi produk IKM Maluku Utara

- Mengintensifkan pengawasan barang beredar dan jasa
- Mengembangkan sistem pengaduan konsumen online

Strategi 2.5: Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting

- Mengembangkan sistem monitoring harga real-time
- Koordinasi dalam rangka menjamin ketersediaan dan peningkatan *buffer stock* bapokting khususnya pada wilayah rawan kelangkaan
- Penyelenggaraan operasi pasar/pasar murah maupun penggunaan instrumen lainnya dalam rangka stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting
- Mengkoordinasikan kelancaran distribusi barang pokok lintas kabupaten/kota

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai panduan operasional dalam implementasi strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel III.02 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra PD
1	Mewujudkan industri dan perdagangan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	1. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah industri pengolahan	1.1 Diversifikasi dan Hilirisasi Industri Berbasis Komoditas Unggulan	Fasilitasi Sarana dan Prasarana industri daerah dalam rangka penumbuhan populasi IKM, diversifikasi dan hilirisasi Komoditi Unggulan Maluku Utara Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan sentra industri pengolahan pala Maluku Utara Fasilitasi investasi industri oleokimia berbasis kelapa Koordinasi dan pelaksanaan pembangunan serta pengembangan industri pengolahan hasil laut dan industri unggulan lainnya Koordinasi implementasi pemberian insentif bagi industri yang melakukan hilirisasi
			1.2 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Industri	Penyelenggaraan bimbingan teknis SDM Industri daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan populasi tenaga kerja di sektor Industri pengolahan Koordinasi dan pelaksanaan program kerjasama dengan perguruan tinggi dan SMK di Maluku Utara dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dan WUB Industri Daerah Koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam rangka mendorong implementasi sertifikasi kompetensi SDM Industri Daerah Koordinasi dan kerjasama implementasi program magang industri
			1.3 Penguatan Infrastruktur dan Ekosistem Industri	Koordinasi Pembangunan dan pengembangan kawasan industri Daerah di 10 Kab/Kota Koordinasi Pembangunan dan pengembangan kawasan industri prioritas Nasional di Maluku Utara

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra PD
2		2. Meningkatkan efisiensi sistem distribusi dan logistik kepulauan		Pengawasan dan pengendalian Pembangunan Industri Fasilitasi implelementasi sertifikasi wajib bagi produk IKM Maluku Utara Optimalisasi penggunaan dan pelaporan Sistem Informasi Industri Nasional serta pengembangan sistem informasi industri Maluku Utara
			1.4 Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan	Mendorong penerapan prinsip industri hijau dan ekonomi sirkular Mengembangkan industri kreatif berbasis kearifan lokal Memfasilitasi sertifikasi produk organik dan ramah lingkungan Mengimplementasikan insentif untuk industri berkelanjutan
			2.1 Optimalisasi Sistem Distribusi dan Logistik Kepulauan	Pembangunan pusat distribusi logistik Maluku Utara Koordinasi lintas sektor dalam rangka pengembangan dan peningkatan moda transportasi guna kelancaran sistim logistik perdagangan yang efektif dan efisien Integrasi sistem logistik dengan program Tol Laut
			2.2 Akselerasi Transformasi Digital Perdagangan	Peningkatan layanan perizinan berusaha sektor perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi Pelatihan digital dan implementasi pembayaran QRIS maupun payment gateway bagi IKM dan pelaku usaha perdagangan Implementasi dan pengembangan pusat data perdagangan Maluku Utara yang terintegrasi dengan Satu Data Maluku Utara serta SP2KP Kemendag
			2.3 Penguatan Akses Pasar dan Promosi Produk Lokal	Fasilitasi pemasaran produk IKM daerah pada retail dan pasar modern di Maluku Utara Fasilitasi promosi dagang produk unggulan Maluku Utara melalui partisipasi pameran dagang skala lokal dan nasional Pengembangan brand "Maluku Utara Spice Island" Fasilitasi penumbuhan eksportir baru Maluku Utara
			2.4 Penguatan Sistem Perlindungan Konsumen dan Standardisasi	Peningkatan Layanan dan Penanganan Pengaduan konsumen dan Tertib niaga Pembentukan BPSK dan mendorong tumbuh berkembangnya LPKSM baru di Maluku Utara Pengawasan rutin peredaran Barang beredar dan jasa serta tertib niaga di 10 Kab/Kota Pengembangan laboratorium uji dan kalibrasi terakreditasi guna peningkatan perlindungan konsumen serta pemenuhan stardardisasi mutu produk Industri daerah Pemantauan mutu produk komoditi unggulan Maluku Utara
			2.5 Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Pokok	Koordinasi dan kerjasama lintas sektor guna menjamin ketersediaan buffer stock bapokting Maluku Utara Operasi pasar dan Pasar murah dalam rangka pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan penting di 10 Kab/Kota Implementasi sistem monitoring harga online real-time Koordinasi kelancaran distribusi bapokting melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah

Sumber : Disperindag Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025

3.5 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung implementasi strategi dan arah kebijakan tersebut, diperlukan komitmen pendanaan yang memadai dari berbagai sumber:

1. APBD Provinsi
2. APBN
3. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)
4. Dana Corporate Social Responsibility (CSR)
5. Kerjasama Internasional

3.6 Kerangka Regulasi

Pencapaian tujuan dan sasaran juga memerlukan dukungan regulasi yang kuat:

1. **Peraturan Gubernur** tentang:
 - Pengembangan Kawasan Industri Provinsi Maluku Utara
 - Sistem Logistik dan Distribusi Kepulauan
 - Insentif Investasi Industri dan Perdagangan
 - Standardisasi dan Sertifikasi Produk Lokal
2. **Peraturan Daerah** tentang:
 - Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)
 - Perlindungan dan Pemberdayaan IKM Maluku Utara
 - Penyelenggaraan Perdagangan
 - Pengembangan Industri Daerah

3.7 Kerangka Kelembagaan

Penguatan kelembagaan diperlukan untuk efektivitas implementasi:

1. **Internal:** Restrukturisasi organisasi Dinas sesuai kebutuhan
2. **Eksternal:** Penguatan koordinasi dengan:

- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
- Forum Koordinasi Industri dan Perdagangan
- Asosiasi Pelaku Usaha
- Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset

Dengan kerangka tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang komprehensif ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara optimis dapat berkontribusi signifikan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang bangkit, maju, sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tabel III.03 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
FONDASI DIGITAL & INFRASTRUKTUR	PENGUATAN KAPASITAS & EKSPANSI	AKSELERASI PERTUMBUHAN	INTEGRASI & OPTIMALISASI	KONSOLIDASI & KEBERLANJUTAN
Anggaran Indikatif:	Anggaran Indikatif:	Anggaran Indikatif:	Anggaran Indikatif:	Anggaran Indikatif:
Rp 25 Miliar	Rp 75 Miliar	Rp 100 Miliar	Rp 125 Miliar	Rp 150 Miliar
Fokus Utama:	Fokus Utama:	Fokus Utama:	Fokus Utama:	Fokus Utama:
Membangun fondasi digital dan menyiapkan infrastruktur dasar	Memperkuat kapasitas SDM dan ekspansi jaringan	Akselerasi pertumbuhan melalui optimalisasi sumber daya	Integrasi sistem dan optimalisasi kinerja	Konsolidasi pencapaian dan memastikan keberlanjutan

Sumber : Disperindag Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025

Keterangan Pentahapan:

- **Tahap I (2025):** Fokus pada pembangunan fondasi sistem digital, infrastruktur dasar, dan quick wins yang dapat segera dirasakan masyarakat
- **Tahap II (2026):** Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM serta ekspansi program ke wilayah yang lebih luas
- **Tahap III (2027):** Akselerasi pertumbuhan dengan memanfaatkan fondasi yang telah dibangun
- **Tahap IV (2028):** Integrasi seluruh sistem dan optimalisasi untuk mencapai efisiensi maksimal
- **Tahap V (2029):** Konsolidasi seluruh pencapaian dan memastikan keberlanjutan program

Tabel III.04 Operasionalisasi NSPK Dan Arah Kebijakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. BIDANG INDUSTRI				
1	Pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal sesuai PP No. 28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian	Mendorong hilirisasi komoditas unggulan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah	Pengembangan sentra industri pengolahan pala di Tidore, Halmahera Selatan, dan Sula Fasilitasi investasi industri oleokimia berbasis kelapa Pengembangan industri pengolahan hasil laut terintegrasi Pemberian insentif untuk industri yang melakukan hilirisasi	Fokus pada komoditas pala, kelapa, cengkeh, dan perikanan
2	Penerapan standar industri hijau sesuai Permen Perindustrian No. 5/2019	Pengembangan ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan	Penerapan standar industri hijau Insentif untuk industri ramah lingkungan Penggunaan energi terbarukan di kawasan industri Pengelolaan limbah industri yang terjamin dan ramah lingkungan	
3	Pembangunan SDM Industri sesuai UU No. 3/2014 tentang Perindustrian	Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung industrialisasi	Penyelenggaraan pelatihan teknis minimal 2 kali per tahun per kabupaten Pengembangan program kerjasama dengan perguruan tinggi dan SMK Koordinasi Fasilitasi sertifikasi kompetensi Implementasi program magang industri	
4	Pengembangan kawasan industri sesuai PP No. 142/2015 tentang Kawasan Industri	Penyediaan infrastruktur industri yang memadai dan merata	Pembangunan kawasan industri Pembangunan laboratorium uji terakreditasi Pengembangan Sistem Informasi Industri Maluku Utara (SIIMUT)	
10	Pengembangan ekonomi kreatif sesuai Perpres No. 142/2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal	Pengembangan produk ekonomi kreatif per tahun Fasilitasi sertifikasi organik untuk produk lokal Implementasi program Corporate Social Responsibility terintegrasi Pemberian insentif untuk industri hijau per tahun	
B. BIDANG PERDAGANGAN				
5	Modernisasi perdagangan sesuai UU No. 7/2014 tentang Perdagangan	Transformasi digital perdagangan dan pemberdayaan pelaku usaha	Pelatihan digital untuk pelaku usaha perdagangan Fasilitasi QRIS dan payment gateway untuk merchant Pembangunan Pusat Data Perdagangan Maluku Utara	
6	Pengembangan logistik nasional sesuai Perpres No. 26/2012 tentang Cetak Biru	Penguatan sistem distribusi kepulauan untuk	Pembangunan pusat distribusi provinsi/regional	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
	Pengembangan Sistem Logistik Nasional	pemerataan ekonomi	Integrasi sistem logistik dengan program Tol Laut	
7	Perlindungan konsumen sesuai UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen	Penguatan sistem perlindungan konsumen dan standardisasi produk	Pembentukan BPSK dan pembentukan LPKSM di Maluku Utara Pembangunan Implementasi Sistem Informasi Pengaduan Konsumen Pengawasan rutin Barang Beredar, Jasa dan Tata Niaga	
8	Stabilisasi harga sesuai Perpres No. 71/2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok	Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang pokok	Operasi pasar di kabupaten/kota Implementasi sistem monitoring harga online real-time Koordinasi distribusi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah	
9	Pengembangan ekspor daerah sesuai PP No. 29/2019 tentang Ekspor dan Impor	Peningkatan ekspor produk non pertambangan	Fasilitasi masuk pasar modern untuk produk lokal Partisipasi pameran dagang skala nasional per tahun Pengembangan brand "Maluku Utara Spice Island" Fasilitasi pembinaan ekspor untuk eksportir baru	

Sumber : Disperindag Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Transformasi sektor industri dan perdagangan Maluku Utara memerlukan langkah-langkah konkret yang terukur dan sistematis. Bab ini menyajikan penjabaran operasional dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam bab-bab sebelumnya menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2029. Setiap program dirancang sebagai respons strategis terhadap permasalahan mendasar yang telah diidentifikasi, dengan mempertimbangkan potensi sumber daya yang dimiliki serta peluang yang tersedia. Penyusunan program dan kegiatan dalam Renstra ini didasarkan pada pendekatan *evidence-based planning* yang mengintegrasikan hasil analisis mendalam terhadap kondisi eksisting, proyeksi kebutuhan pembangunan, serta *best practices* dari daerah lain yang berhasil melakukan transformasi ekonomi. Dengan karakteristik Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan yang memiliki 901 pulau, setiap program dirancang dengan mempertimbangkan aspek konektivitas, pemerataan akses, dan keberlanjutan dampak pembangunan.

Mengacu pada enam isu strategis yang telah dirumuskan, program-program prioritas dikembangkan dengan prinsip keterpaduan dan sinergi. Program hilirisasi industri tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan program pengembangan SDM yang kompeten. Demikian pula, program digitalisasi Pelaku Usaha Perdagangan dan IKM memerlukan fondasi berupa infrastruktur digital yang memadai. Oleh karena itu, arsitektur program dalam dokumen ini dirancang sebagai satu kesatuan sistem yang saling menguatkan.

Dalam konteks keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun SDM, prioritas menjadi keniscayaan. Program-program yang memiliki *multiplier effect* tinggi dan mampu menggerakkan sektor-sektor lain mendapat prioritas utama. Misalnya, program pengembangan sentra industri pengolahan komoditas unggulan tidak hanya akan meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan usaha dan industri kecil menengah pendukung, dan meningkatkan pendapatan petani sebagai pemasok bahan baku.

Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang spesifik dengan output yang jelas dan terukur. Kegiatan-kegiatan ini kemudian di *breakdown* lagi menjadi sub

kegiatan yang lebih teknis dan operasional. Struktur berjenjang ini memudahkan dalam monitoring pelaksanaan, evaluasi capaian, serta identifikasi kendala di lapangan. Dengan demikian, penyesuaian dan perbaikan dapat dilakukan secara cepat tanpa mengganggu pencapaian tujuan strategis. Untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, setiap program dilengkapi dengan indikator kinerja yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*). Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis, sementara Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan. Target kinerja ditetapkan secara progresif dengan mempertimbangkan baseline kondisi saat ini dan proyeksi pertumbuhan yang realistis.

Pendanaan program menjadi aspek krusial yang menentukan feasibilitas implementasi. Dalam bab ini disajikan kerangka pendanaan indikatif yang mengintegrasikan berbagai sumber pembiayaan: APBD Provinsi, APBN melalui Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan, kerjasama dengan swasta melalui skema *Public-Private Partnership*, serta potensi pendanaan dari Lembaga/pihak eksternal. Diversifikasi sumber pendanaan ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber dan memastikan keberlanjutan program.

Pelaksanaan program-program dalam Renstra ini memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan transformasi ekonomi daerah. Kerjasama dengan Dinas Perhubungan diperlukan untuk mengatasi masalah konektivitas dan logistik. Sinergi dengan Dinas Pendidikan mutlak untuk program pengembangan SDM. Kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM penting dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil. Bahkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kunci untuk memastikan program dapat diimplementasikan hingga level *grassroot*.

Aspek inovasi dan adaptasi teknologi menjadi benang merah yang mengikat seluruh program. Di era Revolusi Industri 5.0, tidak ada pilihan selain mengintegrasikan teknologi digital dalam setiap aspek pembangunan industri dan perdagangan. Mulai dari sistem informasi pasar real-time, *platform e-commerce* untuk Pelaku usaha perdagangan IKM dan UMKM, smart manufacturing untuk industri pengolahan, hingga

blockchain untuk menjamin ketertelusuran produk ekspor. Investasi pada teknologi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk survival di pasar global yang semakin kompetitif.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tantangan dan keterbatasan sumber daya yang ada, program-program dalam bab ini dirancang dengan pendekatan *quick wins* dan *long term impact*. Beberapa program dirancang untuk memberikan hasil cepat yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka pendek, sementara program lainnya merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya baru akan terlihat dalam 3-5 tahun ke depan. Kombinasi ini penting untuk menjaga momentum pembangunan sekaligus membangun fondasi yang kuat untuk transformasi ekonomi berkelanjutan.

Tabel IV.01 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Terwujudnya daya saing industri dan perdagangan - Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	Mewujudkan industri dan perdagangan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah industri pengolahan	Meningkatnya realisasi Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi implementasi Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)		
					Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))		
					Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
					Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Laporan)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.1.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0006 - Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
					Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Laporan)	3.31.02.1.01.0007 - Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri (Rekomendasi)	3.31.02.1.01.0008 - Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	3.31.02.1.01.0010 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatkan kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian		Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
					Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Terselenggaranya Layanan Penerbitan dan pengawasan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	
					-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri Nasional		Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Meningkatnya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas (Dokumen)	3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.1.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas (Dokumen)	3.31.04.1.01.0002 - Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.1.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	
		Meningkatnya Efisiensi Distribusi dan Kinerja Perdagangan			Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)		
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu layanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.1.01 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	
					Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.1.01 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	
					Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.1.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.1.01.0002 - Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu layanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.1.02 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.1.02.0001 - Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		
				Meningkatnya pengendalian Usaha Perdagangan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah laporan pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya (laporan)	3.30.02.1.03 - Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	
				Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission (Dokumen)	3.30.02.1.03 - Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar		
				Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission (Dokumen)	3.30.02.1.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		
				Jumlah laporan pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya (laporan)	3.30.02.1.03.0005 - Pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya		
				Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan Angka Pengenal Importir (API) sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3.30.02.1.04 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3.30.02.1.04.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
			Meningkatnya kualitas Sarana Perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Meningkatnya cakupan kualitas dan kuantitas Sarana Pusat Distribusi Perdagangan	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan)	3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Laporan)	3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	
					Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi (Orang)	3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Unit)	3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Unit)	3.30.03.1.01.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Laporan)	3.30.03.1.01.0002 - Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	
					Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi (Orang)	3.30.03.1.01.0003 - Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	
					Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan)	3.30.03.1.01.0004 - Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	
				Terwujudnya Jaminan Ketersediaan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor (Laporan)	3.30.04.1.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor (laporan)	3.30.04.1.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor (Laporan)	3.30.04.1.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor (laporan)	3.30.04.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	
				Terwujudnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting Perdagangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	3.30.04.1.02 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.1.02 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.1.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	3.30.04.1.02.0002 - Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terkendalinya distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (Laporan)	3.30.04.1.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	
					Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	3.30.04.1.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	
					Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	3.30.04.1.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (Laporan)	3.30.04.1.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	
			Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor		Pertumbuhan ekspor produk non migas (%)	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Terselenggaranya promosi dagang produk unggulan daerah melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	
					Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi (Produk)	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.1.01.0001 - Pameran Dagang Internasional/Nasional	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	3.30.05.1.01.0002 - Pameran Dagang Lokal	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.1.01.0003 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
					Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi (Produk)	3.30.05.1.01.0004 - Peningkatan Citra Produk Ekspor	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk		Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
					Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan Berlaku (%)	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			Meningkatnya Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	3.30.06.1.01 - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani (Pengaduan)	3.30.06.1.01 - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	3.30.06.1.01.0001 - Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani (Pengaduan)	3.30.06.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	
				Meningkatnya kualitas komoditi Potensial Yang Sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan (laporan)	3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah produk potensial yang dipantau (Produk)	3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan (Sertifikat)	3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan (Sertifikat)	3.30.06.1.02.0004 - Pengembangan Layanan Kalibrasi	
					Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan (laporan)	3.30.06.1.02.0005 - Pengembangan Layanan Pengujian	
					Jumlah produk potensial yang dipantau (Produk)	3.30.06.1.02.0006 - Pemantauan Mutu Produk	
				Terselenggaranya pengawasan barang beredar dan Jasa sesuai dengan ketentuan perundang undangan	Jumlah Kasus yang Ditangani (Kasus)	3.30.06.1.03 - Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan)	3.30.06.1.03 - Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan)	3.30.06.1.03.0003 - Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
					Jumlah Kasus yang Ditangani (Kasus)	3.30.06.1.03.0004 - Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Daerah		Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				Terselenggaranya fasilitasi Promosi Produk Dalam Negeri Daerah	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri (UMKM)	3.30.07.1.01 - Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri (UMKM)	3.30.07.1.01.0002 - Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	
				Tertaksananya Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri Daerah	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	3.30.07.1.02 - Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	3.30.07.1.02.0002 - Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	
				Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Daerah	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer (Laporan)	3.30.07.1.03 - Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Laporan)	3.30.07.1.03 - Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Laporan)	3.30.07.1.03.0002 - Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer (Laporan)	3.30.07.1.03.0005 - Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah			Nilai SAKIP (Nilai)		
			Meningkatnya kinerja penunjang urusan perangkat daerah		Efektivitas Pelaksanaan Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.31.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.31.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.31.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.31.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.31.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.31.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Akuntabilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3.31.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3.31.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.31.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.31.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.31.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3.31.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.31.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3.31.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Meningkatnya Akuntabilitas Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.31.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.31.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.31.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.31.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.31.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.31.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.31.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.31.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.31.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.31.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.31.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.31.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.31.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.31.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.31.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.31.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.31.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.31.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.31.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.31.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.31.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.31.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.31.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.31.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.31.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.31.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.31.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.31.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.31.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.31.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.31.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.31.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.31.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.31.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.31.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.31.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.31.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.31.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.31.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.31.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.31.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.31.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber : Disperindag Provinsi Maluku Utara, 2025

Tabel IV.02 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				8.625.000.000		9.650.000.000		10.550.000.000		10.550.000.000		10.550.000.000	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100	90	450.000.000	90	450.000.000	90	450.000.000	90	450.000.000	90	450.000.000	
3.30.02.1.01 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Persentase Penerbitan Layanan Dokumen Yang Tepat Waktu (Persen)	100	90	100.000.000	90	100.000.000	90	100.000.000	90	100.000.000	90	100.000.000	
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu layanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Persentase Penerbitan Layanan Dokumen Yang Tepat Waktu	100	90	100.000.000	90	100.000.000	90	100.000.000	90	100.000.000	90	100.000.000	
3.30.02.1.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Penerbitan SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	1-5	50.000.000	1-5	50.000.000	1-5	50.000.000	1-5	50.000.000	1-5	50.000.000	
3.30.02.1.01.0002 - Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beratkohol Golongan B dan C melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	1-5	50.000.000	1-5	50.000.000	1-5	50.000.000	1-5	50.000.000	1-5	50.000.000	
3.30.02.1.02 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu layanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penerbitan Layanan Dokumen Yang Tepat Waktu	100	90	75.000.000	90	75.000.000	90	75.000.000	90	75.000.000	90	75.000.000	
3.30.02.1.02.0001 - Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Terfasilitasinya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	
3.30.02.1.03 - Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Meningkatnya pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Persentase Penerbitan Layanan Dokumen Yang Tepat Waktu	100	90	200.000.000	90	200.000.000	90	200.000.000	90	200.000.000	90	200.000.000	
3.30.02.1.03.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Dokumen Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya untuk Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	0	1-5	50.000.000	1-5	50.000.000	1-5	50.000.000	1-5	50.000.000	1-5	50.000.000	
3.30.02.1.03.0005 - Pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelaberan Bahan Berbahaya				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Tersedianya laporan Pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelaberan Bahan Berbahaya	Jumlah laporan pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	0	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	
3.30.02.1.04 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan Angka Pengenal Importir (API) sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku	Persentase Penerbitan Layanan Dokumen Yang Tepat Waktu	100	90	75.000.000	90	75.000.000	90	75.000.000	90	75.000.000	90	75.000.000	
3.30.02.1.04.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	382	400-500	75.000.000	400-500	75.000.000	400-500	75.000.000	400-500	75.000.000	400-500	75.000.000	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				2.150.000.000		2.150.000.000		3.150.000.000		3.150.000.000		3.150.000.000	
Meningkatnya kualitas Sarana Perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	0	1	2.150.000.000	1	2.150.000.000	1	3.150.000.000	1	3.150.000.000	1	3.150.000.000	
3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas				2.150.000.000		2.150.000.000		3.150.000.000		3.150.000.000		3.150.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya cakupan kualitas dan kuantitas Sarana Pusat Distribusi Perdagangan	Cakupan Pembangunan dan Fasilitas Sarana Distribusi Perdagangan (Persen)		100	2.150.000.000	100	2.150.000.000	100	3.150.000.000	100	3.150.000.000	100	3.150.000.000	
3.30.03.1.01.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				2.000.000.000		2.000.000.000		2.725.000.000		2.725.000.000		2.725.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	0	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.725.000.000	1	2.725.000.000	1	2.725.000.000	
3.30.03.1.01.0002 - Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				-		-		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	0	0	-	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
3.30.03.1.01.0003 - Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas				-		-		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Meningkatnya Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	0	0	-	0	-	20	75.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000	
3.30.03.1.01.0004 - Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Terselenggaranya kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING				3.400.000.000		3.675.000.000		3.675.000.000		3.675.000.000		3.675.000.000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	6.81	9.0	3.400.000.000	9.0	3.675.000.000	9.0	3.675.000.000	9.0	3.675.000.000	9.0	3.675.000.000	
3.30.04.1.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi				100.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000	
Terwujudnya Jaminan Ketersediaan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	100	100	100.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	
3.30.04.1.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				50.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	2	2	50.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	
3.30.04.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				50.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	2	2	50.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.30.04.1.02 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				3.150.000.000		3.150.000.000		3.150.000.000		3.150.000.000		3.150.000.000	
Terwujudnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting Perdagangan	Persentase Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu (Persen)	6,81	<9	3.150.000.000	<9%	3.150.000.000	<9%	3.150.000.000	<9%	3.150.000.000	<9%	3.150.000.000	
3.30.04.1.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	0	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	
3.30.04.1.02.0002 - Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000	
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	8	10	3.000.000.000	10	3.000.000.000	10	3.000.000.000	10	3.000.000.000	10	3.000.000.000	
3.30.04.1.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya				150.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Terkendalinya distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Cakupan pemantauan/pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (%)	-	100	150.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	
3.30.04.1.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi				75.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	0	1	75.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
3.30.04.1.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida				75.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	0	1	75.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	
Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Pertumbuhan ekspor produk non migas	8.63	7.5	750.000.000	7.5	750.000.000	7.5	750.000.000	7.5	750.000.000	7.5	750.000.000	
3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi				750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terselenggaranya promosi dagang produk unggulan daerah melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Produk Yang dipromosikan (Produk)	0	5	750.000.000	5	750.000.000	5	750.000.000	5	750.000.000	5	750.000.000	
3.30.05.1.01.0001 - Pameran Dagang Internasional/Nasional				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	0	5	350.000.000	5	350.000.000	5	350.000.000	5	350.000.000	5	350.000.000	
3.30.05.1.01.0002 - Pameran Dagang Lokal				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	0	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	
3.30.05.1.01.0003 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	
3.30.05.1.01.0004 - Peningkatan Citra Produk Ekspor				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	0	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				1.325.000.000		2.075.000.000		1.975.000.000		1.975.000.000		1.975.000.000	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100	92	1.325.000.000	93	2.075.000.000	94	1.975.000.000	95	1.975.000.000	96	1.975.000.000	
	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan Berlaku	76.6	80		80		80		85		85		
3.30.06.1.01 - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000		975.000.000		975.000.000		975.000.000		975.000.000	
Meningkatnya Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100	90	75.000.000	90	975.000.000	90	975.000.000	90	975.000.000	90	975.000.000	
3.30.06.1.01.0001 - Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen				-		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000	
Meningkatnya Keberdayaan dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	0	0	-	1	900.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000	
3.30.06.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Tersedianya Layanan Penanganan Pengaduan Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	0	5	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	
3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				825.000.000		675.000.000		575.000.000		575.000.000		575.000.000	
Meningkatnya kualitas Komoditi Potensial Yang Sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku	Persentase Komoditi Potensial Yang Sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku (Persen)	76,6	70	825.000.000	80	675.000.000	80	575.000.000	80	575.000.000	85	575.000.000	
3.30.06.1.02.0004 - Pengembangan Layanan Kalibrasi				400.000.000		250.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Meningkatnya Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	0	1	400.000.000	10	250.000.000	10	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	
3.30.06.1.02.0005 - Pengembangan Layanan Pengujian				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Layanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	173	100-160	200.000.000	100-160	200.000.000	200-320	200.000.000	200-320	200.000.000	200-320	200.000.000	
3.30.06.1.02.0006 - Pemantauan Mutu Produk				225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000	
Meningkatnya Kesesuaian Mutu Produk Terhadap Standar/persyaratan teknis yang berlaku	Jumlah produk potensial yang dipantau	2	2	225.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	
3.30.06.1.03 - Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				425.000.000		425.000.000		425.000.000		425.000.000		425.000.000	
Terselenggaranya pengawasan barang beredar dan Jasa sesuai dengan ketentuan perundang undangan	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan (Persen)	100	90	425.000.000	90	425.000.000	90	425.000.000	90	425.000.000	90	425.000.000	
3.30.06.1.03.0003 - Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga				375.000.000		375.000.000		375.000.000		375.000.000		375.000.000	
Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	1	4	375.000.000	4	375.000.000	4	375.000.000	4	375.000.000	4	375.000.000	
3.30.06.1.03.0004 - Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	0	1-5	50.000.000	1-5	50.000.000	2-10	50.000.000	2-10	50.000.000	2-10	50.000.000	
3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000	
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Daerah	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	100	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	
3.30.07.1.01 - Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Terselenggaranya fasilitasi Promosi Produk Dalam Negeri Daerah	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	0	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	
3.30.07.1.01.0002 - Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	0	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	
3.30.07.1.02 - Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri Daerah	Jumlah Produk Lokal yang memperoleh fasilitasi pemasaran (Produk)	0	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.30.07.1.02.0002 - Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	0	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
3.30.07.1.03 - Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Daerah	Jumlah Produk yang Memperoleh Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi (Produk)	0	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	
3.30.07.1.03.0002 - Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Tersedianya Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Peningkatan Literasi Anak Didik, Generasi Muda dan Masyarakat Tentang Kecintaan dan Kebanggaan dalam Menggunakan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
3.30.07.1.03.0005 - Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Tersedianya laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	0	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				5.337.089.926		5.521.651.750		5.753.941.345		6.753.252.741		7.954.537.903	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.813.439.525		1.971.208.764		2.093.396.482		2.223.501.750		2.363.786.590	
Meningkatnya kinerja penunjang urusan perangkat daerah	Efektivitas Pelaksanaan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	95	1.813.439.525	95	1.971.208.764	95	2.093.396.482	95	2.223.501.750	95	2.363.786.590	
3.31.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				140.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		300.000.000	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	140.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	300.000.000	
3.31.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				90.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		250.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	90.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	3	250.000.000	
3.31.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	
3.31.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	
3.31.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Meningkatnya Akuntabilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	14	14	150.000.000	14	150.000.000	14	150.000.000	14	150.000.000	14	150.000.000	
3.31.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				-		-		-		-		-	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	
3.31.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				135.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	135.000.000	12	135.000.000	12	135.000.000	12	135.000.000	12	135.000.000	
3.31.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
3.31.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
3.31.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
Meningkatnya Akuntabilitas Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	15	15	40.000.000	15	40.000.000	15	40.000.000	15	40.000.000	15	40.000.000	
3.31.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
3.31.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
3.31.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	
3.31.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000	
Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian	12	12	210.000.000	12	210.000.000	12	210.000.000	12	210.000.000	12	210.000.000	
3.31.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	
3.31.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	
3.31.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
3.31.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90	90	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	
3.31.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	
3.31.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				743.439.525		741.208.764		788.396.482		768.501.750		883.786.590	
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	743.439.525	12	741.208.764	12	788.396.482	12	768.501.750	12	883.786.590	
3.31.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				108.439.525		106.208.764		153.396.482		133.501.750		248.786.590	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	108.439.525	1	106.208.764	1	153.396.482	1	133.501.750	1	248.786.590	
3.31.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
3.31.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	
3.31.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
3.31.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	
3.31.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	
3.31.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	
3.31.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	
3.31.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				175.000.000		325.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000	
Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	12	12	175.000.000	12	325.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	
3.31.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	
3.31.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000		200.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	50.000.000	1	200.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
3.31.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	
3.31.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		-		-		-	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-		-		-		-		-	
3.31.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	
3.31.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	
3.31.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	
3.31.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				280.000.000		280.000.000		505.000.000		655.000.000		530.000.000	
Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	280.000.000	12	280.000.000	12	505.000.000	12	655.000.000	12	530.000.000	
3.31.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	5	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
3.31.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	15	30.000.000	
3.31.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		275.000.000		425.000.000		300.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	275.000.000	1	425.000.000	1	300.000.000	
3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				2.973.650.401		3.000.442.986		3.110.544.863		3.979.750.991		5.040.751.313	
Meningkatnya realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	0	90	2.973.650.401	90	3.000.442.986	90	3.110.544.863	90	3.979.750.991	90	5.040.751.313	
3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				2.973.650.401		3.000.442.986		3.110.544.863		3.979.750.991		5.040.751.313	
Meningkatnya realisasi implementasi Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan implementasi Perencanaan dan Pembangunan Industri	100	100	2.973.650.401	100	3.000.442.986	100	3.110.544.863	100	3.979.750.991	100	5.040.751.313	
3.31.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
3.31.02.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
3.31.02.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
3.31.02.1.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1.648.650.401		1.675.442.986		1.785.544.863		2.654.750.991		3.715.751.313	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	1	1.648.650.401	1	1.675.442.986	1	1.785.544.863	1	2.654.750.991	1	3.715.751.313	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.31.02.1.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	
3.31.02.1.01.0006 - Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terevaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
3.31.02.1.01.0007 - Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Tersedianya data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	
3.31.02.1.01.0008 - Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Tersusunnya rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	
3.31.02.1.01.0010 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Meningkatkan kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	-	81	150.000.000	82	150.000.000	83	150.000.000	84	150.000.000	85	150.000.000	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	75		75		75		75		75		
3.31.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terselenggaranya Layanan Penerbitan dan pengawasan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah IUKI Dan IPKI Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	0	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	
3.31.03.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	-	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	
3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Meningkatnya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Data Perusahaan Industri Besar Dan Perusahaan Kawasan Industri Lintas Kabupaten/Kota Yang Masuk Dalam SIINas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Besar dan Perusahaan Kawasan Industri Lintas Kab/Kota (Persen)	60	75	400.000.000	75	400.000.000	75	400.000.000	75	400.000.000	75	400.000.000	
3.31.04.1.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	0	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	
3.31.04.1.01.0002 - Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terdiseminasi dan terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
3.31.04.1.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
Terantau dan Terevaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penvampaian Data ke SIINas	0	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	

Sumber : Disperindag Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025

Tabel IV.03 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi, sub kegiatan : Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Sub Kegiatan Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi	
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi, Sub Kegiatan : Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan, Sub kegiatan : Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya, Sub Kegiatan : Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi, Sub Kegiatan : Sub Kegiatan Pameran Dagang Internasional/Nasional Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	
4	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi Pembangunan Industri	. Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat - Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri - Sub Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri . Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	

Sumber : Disperindag Provinsi Maluku Utara, Tahun 2025

Tabel IV.04 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	33,92	34,73	35,12	35,5	35,6	35,7	35,8	
2.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	10,43	10,5 – 11,5	9,5 – 10,5	9,5 – 10,5	9,5 – 10,5	9,5 – 10,5	9,5 – 10,5	
3.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PD	Nilai	66,01	66,21	66,24	66,27	66,3	66,44	65	

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD, BAPPEDA, 2025

Tabel IV.05 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
A.	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
1.	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	92	92	93	94	95	96	
2.	Pertumbuhan ekspor produk non tambang dan Produk Turunannya	%	8.63	>7.5	>7.5	>7.5	>7.5	>7.5	>7.5	
3.	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan Berlaku	%	76.6	80	80	80	80	85	85	
4.	Pertumbuhan PDRB Perdagangan	%	14,24	5,5-7,5	5,5-7,5	5,5-7,5	5,5-7,5	5,5-7,5	5,5-7,5	
5.	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	8,63	12,25	7,5-10	11	12	13	14	
6.	Persentase kepatuhan berusaha	%	100	92	92	93	94	95	96	
7.	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	%	n/a	100	100	100	100	100	100	
8.	Tingkat Inflasi Pangan Bergejolak	%	7,93	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	
B.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	33.92	34.73	35.12	35.5	35.6	35.7	35.8	
2.	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	%	50	50	65	75	75	75	80	
3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	75	75	75	75	75	75	
4	Kontribusi PDRB Industri non Logam dasar	%	1,55	2,43	2,47	2,48	2,49	2,50	2,51	
5	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan igas	%	24,69	23,65	22,5 – 23,00	22,5 – 23,00	23,0 – 23,50	23,50 – 24,00	23,50 – 24,00	
6	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	Juta Orang	32,351	32,558	33,35	33,510	34,35	35,35	36,35	
7	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	(USD Milyar)	288,63	407,028	488,434	490,00	500,00	510,00	520,00	
8	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (USD Miliar)	(USD Miliar)	11,053	8,6345	12,5-14	14-15	15-16	16-17	17-18	
9	Persentase Izin Usaha Industri yang di terbitkan	%	n/a	80	81	82	83	84	85	

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD, BAPPEDA, 2025

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Perindustrian dan Perdagangan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Perindustrian dan Perdagangan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Maluku Utara yang telah dispesifikasi dan tercantum dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 - 2029.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara serta digunakan sebagai bahan penyusunan usulan rancangan RKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara akan terus dilaksanakan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara. Laporan Kinerja (LKjP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara dalam mewujudkan cita-cita Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk membangun Provinsi Maluku Utara menuju ***“Menjaga Keberagaman dan Pemerataan Pembangunan Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan”***.

Sofifi, 13 Oktober 2025

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Maluku Utara



Yudhitya Wahab,SH, M.Si
NIP. 19810106 200501 1 006